



BUKU PROFIL KEPENDUDUKAN



2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sambutan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Timur

*Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagaimana diketahui, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan data kependudukan berskala provinsi. Data tersebut diolah dan disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum, akan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saya memahami bahwa dalam proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan, terdapat kemungkinan perbedaan angka akibat perbedaan konsep, metodologi, serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan yang telah dikonsolidasikan secara nasional dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem SIAK adalah data yang sah dan wajib digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan kriminalitas.

Data kependudukan memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan data yang valid dan mutakhir menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan publik yang responsif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, pengelolaan data kependudukan harus terus ditingkatkan kualitas dan ketepatannya melalui sinergi antarlembaga yang berkelanjutan.



Saya yakin bahwa data statistik kependudukan yang disajikan dalam buku profil ini telah melalui proses verifikasi yang ketat dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengguna data. Di masa mendatang, saya berharap kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi terkait dapat terus diperkuat, sehingga kualitas data yang disajikan semakin informatif, akurat, dan faktual.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas melalui inovasi dan kolaborasi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samarinda, Juni 2025

Kepala Dinas,

KASMAWATI, S.STP, M.Si

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA DINAS.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Sumber Data.....	3
1.5 Konsep dan Definisi.....	3
 BAB II GAMBARAN UMUM	7
2.1 Sejarah Singkat.....	7
2.2 Letak Geografis	8
2.3 Visi, Misi, Prog. Unggulan Pemprov. Kaltim.....	9
2.4 Potensi Daerah	10
2.5 Gambaran Disdukcapil Prov. Kaltim	24
 BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	32
3.1 Kuantitas Penduduk.....	32
3.1.1. Jumlah dan Persebaran Penduduk	32
1. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin.....	32
2. Rasio Kepadatan Penduduk	34
3. Laju Pertumbuhan Penduduk	35
3.1.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	36
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin....	36
2. Rasio Jenis Kelamin.....	38
3. Rasio Ketergantungan.....	40
3.1.3 Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial.....	41
1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	42
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	43
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	44
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan.....	46
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah.....	46
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	47
7. Keluarga	51

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga.....	51
b. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK).....	52
c. Karakteristik Kepala Keluarga	53
3.2 Kualitas Penduduk.....	56
3.2.1. Kesehatan.....	58
1. Kehirian.....	58
a. Angka Kehirian Kasar (<i>Crude Birth Rate/CBR</i>).....	58
b. Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child Women Ration/CWR</i>).....	58
2. Kematian.....	59
a. Angka Kematian Bayi.....	59
b. Angka Kematian Bayi Baru Lahir/Neonatal.....	59
c. Angka Kematian Anak/Balita.....	59
d. Angka Kematian Ibu.....	61
3.2.2. Pendidikan.....	62
1 Angka Melek Huruf.....	62
2 Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni.....	63
a. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	63
b. Angka Partisipasi Murni (APM).....	63
c. Angka Putus Sekolah (APS).....	64
3.2.3 Sosial.....	64
Penduduk Miskin.....	64
3.2.4 Mobilitas.....	66
1 Pengertian.....	66
2 Jenis-jenis Mobilitas Penduduk.....	67
3 Migrasi	67
4 Sebab-Sebab Terjadinya Migrasi	67
5 Jenis-Jenis Migrasi	67
6. Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar	69
 BAB IV KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	71
4.1.1 Kepemilikan Dokumen Kependudukan	71
1. Kartu Keluarga.....	71
2. Kepemilikan KTP Elektronik.....	72
3. Kartu Identitas Anak.....	72
4.1.2 Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.....	73
1 Akta Kehirian.....	74
2 Akta Kematian.....	75

3 Akta Perkawinan.....	76
4 Akta Perceraian.....	77
 BAB V PENUTUP.....	 78

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jarak menurut Kab/Kota	9
Tabel III.1 Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	32
Tabel III.2 Rasio Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota.....	34
Tabel III.3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kabupaten/Kota.....	35
Tabel III.4 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	36
Tabel III.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur.....	39
Tabel III.6 Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	39
Tabel III.7 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kaltim.....	40
Tabel III.8 Penduduk menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	42
Tabel III.9 Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Usia Produktif.....	42
Tabel III.10 Penduduk Bardasarkan Agama dan Kepercayaan.....	43
Tabel III.11 Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	44
Tabel III.12 Penyandang Disabilitas Prov. Kaltim.....	46
Tabel III.13 Penduduk Berdasarkan Golongan Darah.....	46
Tabel III.14 Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	47
Tabel III.15 Angka Perkawinan Kasar per Kab/Kota	48
Tabel III.16 Angka Perkawinan Umum per Kab/Kota.....	49
Tabel III.17 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur.....	50
Tabel III.18 Angka Perceraian Menurut Kelompok Umur.....	50
Tabel III.19 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga.....	51
Tabel III.20 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga	52
Tabel III.21 Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin.....	53
Tabel III.22 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur	53
Tabel III.23 Jumlah KK Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	54
Tabel III.24 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pekerjaan.....	55
Tabel III.25 Rasio Anak Perempuan Tahun 2024.....	59
Tabel III.26 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2020 - 2024	60
Tabel III.27 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020-2024.....	62
Tabel III.28 Angka Melek Huruf Kaltim Tahun 2022-2024	62
Tabel III.29 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2021-2024.....	63
Tabel III.30 Angka Partisipasi Murni 2021-2024.....	63
Tabel III.31 Kemiskinan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	65
Tabel III.32 Penduduk Miskin (ribu/jiwa) Tahun 2022 -2024.....	66
Tabel III.33 Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Tahun 2024	69
Tabel IV.1 Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2024.....	71
Tabel IV.2 Kepemilikan KTP-elektronik.....	72
Tabel IV.3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak	73

Tabel IV.4 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2024	74
Tabel IV.5 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 Tahun	75
Tabel IV.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Prov. Kaltim Tahun 2024.....	75
Tabel IV.7 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Prov. Kaltim Tahun 2024.....	76
Tabel IV.8 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Prov. Kaltim Tahun 2024.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Disdukcapil Prov. Kaltim.....	25
Gambar III.1 Grafik Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Gambar III.2 Diagram Persebaran Penduduk.....	33
Gambar III.3 Diagram Piramida Penduduk Kalimantan Timur.....	36
Gambar III.4 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk.....	41
Gambar III.5 Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	48
Gambar III.6 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024.....	57
Gambar III.7 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020-2024.....	61
Gambar III.8 Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan basis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah Daerah juga berperan penting dalam upaya terciptanya regulasi dan mendorong inovasi dan kreativitas tercipta secara berkelanjutan. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian yaitu terkait kependudukan, dimana kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat dinamis. Kependudukan menjadi masalah global dan merupakan salah satu dari dua sumber masalah kehidupan di dunia yang menonjol disamping masalah lingkungan hidup. Masalah kependudukan terutama masalah pertumbuhan penduduk sudah menjadi fokus diperhatikan dan dibicarakan dunia sejak lama. Upaya pemerintah mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan merupakan wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas, agar ke depan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara kuantitas dan kualitas penduduk.

Berikut landasan pemikiran bahwa Penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan Nasional yang penting untuk dicermati. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penduduk merupakan objek vital dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jadi, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri;
2. Kualitas penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan Nasional;

3. Perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karenanya, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Masalah perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit oleh masyarakat, aspek pembangunan kependudukan menjadi langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, masalah kependudukan menjadi isu strategis dan bersifat lintas sektoral. Pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu direalisasikan, selain daripada itu, sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dalam arti fisik maupun non fisik.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VIII Pasal 49 menyatakan : ***“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan pembangunan”.***

Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Selain itu aturan tersebut menyatakan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketersediaan data kependudukan di semua tingkatan administrasi pemerintahan (kota/kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Provinsi Kalimantan Timur dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

Kerangka pikir penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mencakup 5 (lima) hal pokok bahasan, antara lain :

1. Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak tergambaran kondisi yang sedang berlangsung;
2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk;
3. Teridentifikasinya potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah maupun nasional;
4. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan, kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
5. Mendorong terwujudnya database penduduk dan analisis database kependudukan sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi antara lain :

1. Memberi gambaran kondisi kependudukan Kota Sukabumi, sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan;
2. Bahan analisis dalam penyusunan program-program kependudukan;
3. Bahan evaluasi dan acuan pengambilan kebijakan bidang kependudukan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pembahasan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain :

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial;
3. Mobilitas penduduk;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan terkait dengan kependudukan adalah hasil inventarisasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten/Kota yang telah di konsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024. Data lainnya berasal dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

1.5 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi pokok yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
3. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
5. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
6. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
7. Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat Statistik);
8. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
9. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
10. Migrasi kembali (return migration) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
11. Migrasi semasa hidup (life time migration) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
12. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi); 7 Profil Perkembangan Kependudukan Kota Sukabumi Tahun 2024

13. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
14. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
15. Pengangguran adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survei atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
16. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
17. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
18. Lahir hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
19. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
20. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
21. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
22. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah Banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
23. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (0-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
24. Angka Kematian, Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
25. Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk;
26. Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar.
27. Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun;
28. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;

29. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Sejarah Singkat Provinsi Kalimantan Timur .

Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto. Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No.9). Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas :

1. Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:
 - 1) Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
 - 2) Kotamadya Balikpapan, dengan Kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
2. Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:
 1. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong.
 2. Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
 3. Kabupaten Berau, dengan ibukotanya Tanjung Redeb.
 4. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
3. Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:

- 1) Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar
- 2) Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta
- 3) Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau
- 4) Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan
- 5) Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya)

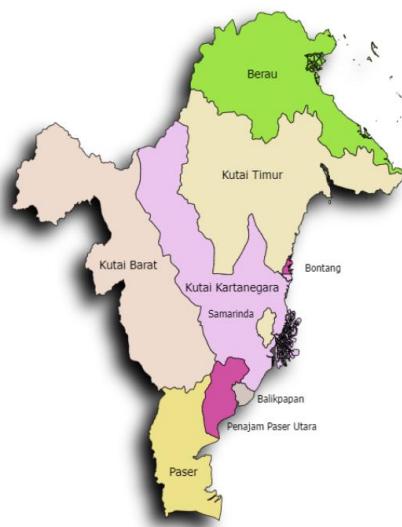
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepatutnya menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama

Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.

Tahun 2012, giliran Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara (UU No.20 Tahun 2012). Lima Kota/Kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Hingga jumlah kota/kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 kota/kabupaten menjadi 9 kota/kabupaten.

Tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan Kabupaten termuda dikaltim, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengenapkan dalam Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 Kota/Kabupaten.

2.2 Letak Geografis Provinsi Kalimantan Timur.



Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah daratan 12.726.752 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km², terletak antara 113°44' dan 119°00' Bujur Timur, dan antara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar disebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah Barat.

Tabel II.1
Luas Wilayah dan Jarak Beberapa Kota dari Samarinda
Menurut Kab/Kota.

Kabupaten/ Kota	Ibu Kota	Luas Daratan	Luas Perairan (Ha)	Luas Wilayah Darat (Ha)	Luas Penge- lolaan Laut 0–4 Mil Km2)	Jarak (Km)
Paser	Tana Paser	1.074.526	44.767	1.119.293	8.200	260
Berau	Tanjung Redeb	2.195.171	24.862	2.220.033	11.962	547
Kutai Kartanegara	Tenggarong	2.571.841	63.254	2.634.895	1.891	31
Kutai Barat	Sendawar	1.537.890	25.170	1.563.060	-	334
Kutai Timur	Sangatta	3.173.519	16.130	3.189.649	2.641	176
Penajam Paser Utara	Penajam	313.195	7.960	321.155	400	130
Mahakam Ulu	Ujoh Bilang	1.531.500	-	1.531.500	-	-
Balikpapan	Balikpapan	50.432	5.696	56.128	287	112
Samarinda	Samarinda	69.496	2.287	71.783	-	-
Bontang	Bontang	16.311	2.945	19.256	275	108
Provinsi Kaltim	Samarinda	12.533.681	193.071	12.726.752	25.656	1.398

Sumber: Kaltim Dalam Angka 2019

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh Kabupaten. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 18 buah, sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang dengan luas masing-masing 13.000 hektar, dan 11.000 hektar.

2.3 VISI, MISI dan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Visi Kaltim Tahun 2025 - 2030

Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

2. Misi

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
- 2) Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dan kesehatan;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi ;
- 5) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal;
- 6) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Program Unggulan

- 1) Gratispol
 - (1) Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3;
 - (2) Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan;
 - (3) Gratis Makanan Bergizi;
 - (4) Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa;
 - (5) Gratis Seragam Sekolah;

- (6) Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;
- (7) Gratis Haji dan Umrah untuk Marbot.

2) Jospol

- (1) Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;
- (2) Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik;
- (3) Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah;
- (4) Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;
- (5) Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;
- (6) Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit;
- (7) Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional;
- (8) Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;
- (9) Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat dan swasta.

2.4 Potensi Daerah

1. Potensi Kehutanan



Upaya Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan terus dilakukan, pada tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan Nomor P.83 tahun 2025 tentang perhutanan Sosial. Dalam Permen LHK Nomor P.83 Tahun 2016 Perhutanan Sosial merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi, dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk mengelola hutannya

sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar kawasan hutan serta terdapat 5 skema perhutanan sosial meliputi Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA).

Kemudian Pasca Undang-undang Cipta Kerja Pemerintah Pusat melakukan Revisi terhadap Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 menjadi Permen LHK nomor 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial tersebut sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2019 – 2023 yaitu salah satunya berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi Kawasan yang berkeadilan dan berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjalankan kebijakan tersebut, sesuai dengan Rencana Strategis 2019-2023 dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Didalam dan Atau Sekitar Kawasan Hutan dengan kegiatan memberikan akses kelola bagi masyarakat atau pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat dalam hal ini adalah program perhutanan Sosial.

Dalam Perkembangan Perhutanan Sosial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 menargetkan luasan perhutanan sosial sebesar 160.000 ha atau rata-rata 32.000 ha per tahun, capain realiasi luas perhutanan sosial di Kalimantan timur pada periode 2019 – 2023 telah melebihi target RPJMD seluas 176.612 hektar. Namun jika melihat secara keseluruhan Luasan Perhutanan Sosial sebelum periode tahun 2019 (RPJMD 2014-2018) yang telah didapat Mencapai seluas 295.655 hektar dengan 139 Surat Keputusan (SK).

Berdasarkan Perkembangan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan April 2024 telah tercatat sebanyak 296.798 hektar dengan 142 Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Memiliki sebanyak 197 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terdiri dari Blue 126 KUPS, Silver 64 KUPS, Gold 5 KUPS dan Platinum 2 KUPS.

Dalam Rangka Meningkatkan Pengelolaan Pengembangan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur Dinas Kehutanan telah menargetkan 2 (dua) capain indikator ke Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 yaitu 20.000 Hektar Pertahun untuk akses Legal dan 20 Kelompok pertahun yang ditingkatkan Kelas Usahanya, hal ini dilakukan untuk dapat menyeimbangkan antar Proses Penyiapan dan Pengembangan Usaha perhutanan Sosial di Kalimantan Timur.

2. Potensi Pariwisata Unggulan

- 1) Pulau Derawan



Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki tiga kecamatan yaitu, Pulau Derawan, Maratua, dan Biduk Biduk, Berau.

Sedikitnya ada empat pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni **Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban** yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik.

Secara geografis, terletak di semenanjung utara perairan laut Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Raburabu, Pulau Samama, Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Nabuko, Pulau Maratua dan Pulau Derawan serta beberapa gosong karang seperti gosong Muaras, gosong Pinaka, gosong Buliulin, gosong Masimbung, dan gosong Tababinga.

Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting yaitu terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau (hutan mangrove). Selain itu banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, duyung (dugong), ikan barakuda dan beberapa spesies lainnya.

Kegiatan yang bisa dilakukan di Pulau Derawan:

- Sewa sepeda keliling pulau
- Bermain di pantai pasir putihnya
- Menikmati *sunset* sambil berfoto di dermaga panjang yang menjorok ke laut
- Berkunjung ke Gusung Pasir Sanggalau (sekitar 20 menit naik *speedboat*) saat air sedang surut
- *Snorkeling*
- Melihat penyu bertelur di malam hari

2) Gunung Embun



Wisata alam Gunung Embun atau Saing Boga dikenal juga dengan negeri diatas awan di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu menjadi salah satu destinasi favorit di Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim.

Gunung Embun sendiri mulai dikenal masyarakat setelah masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API Award) 2020 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kategori dataran tinggi terpopuler di Indonesia.

Menuju Gunung Embun terdapat tiga rute yang dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat.

Rute pertama, jika wisatawan datang dari Penajam Paser Utara (PPU) lurus terus menuju Kota Tana Paser. Melewati Kelurahan Kuaro atau terminal antar provinsi sekitar 10 menit sampai di jalur dua tikungan menanjak, persimpangan Desa Lolo. Dari situ, belok kanan ke arah Desa Luan sekitar 30-45 melalui jalan tanah berbatu.

Rute kedua, datang dari arah Tanah Grogot. Wisatawan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat menuju simpang tiga desa Lolo sekitar 21 Km atau 29 menit barulah belok kiri, menuju ke Gunung Boga sekitar 30-45 menit.

Rute ketiga, datang dari Tanah Grogot melalui Desa Tanah Periuk, menuju Desa Lempesu barulah ke Desa Luan area Gunung Boga sekitar satu jam perjalanan, dengan jalan sebagian aspal dan cor rigid hingga Desa Olong Pinang, setelahnya aspal berlubang dan tanah berbatu.

Untuk jalur ini lebih disarankan menggunakan tour guide pasalnya rambu menuju lokasi tidak tersedia. Sesampainya di lokasi wisatawan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada seperti gazebo, kios untuk UMKM, pos jaga, Musala, area parkir, toilet, tempat swafoto, dan area camping wisatawan.

Di waktu-waktu tertentu, Gunung Embun juga mengadakan festival parlayang dengan menghadirkan atlet dari berbagai provinsi di Indonesia hingga mancanegara.

Agar dapat menikmati keindahan kabut tebal embun yang tepat di puncak gunung, wisatawan dapat menginap atau berangkat pagi dini hari. Embun sendiri mulai muncul saat pagi sebelum pukul enam pagi, dan mulai berkurang di atas pukul 08.00 pagi.

3) Taman Nasional Kutai



Taman Nasional Kutai, satu-satunya taman nasional di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan perwakilan penting hutan hujan tropis yang tersisa. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai reservoir air

dan genetik, tetapi juga sebagai rumah bagi populasi spesies endemik orangutan, *Pongo pygmaeus morio*, yang berada dalam kondisi kritis. Dengan slogan "Discover the secret of Borneo lowland rainforest", Taman Nasional Kutai menawarkan kekayaan alam yang menakjubkan dan beragam.

✓ **Prevab**

Prevab, salah satu objek wisata utama Taman Nasional Kutai yang terletak di tepi Sungai Sangatta, pengunjung dapat menemukan habitat asli orangutan morio. Orangutan ini, dengan bulu coklat kehitaman, rahang besar, dan otak kecil, mampu bertahan dalam kondisi ekstrem seperti kemarau panjang dan keterbatasan pakan. Keberadaan orangutan liar ini menarik minat wisatawan, terutama dari mancanegara. Prevab juga dikenal sebagai stasiun penelitian orangutan, Kamp Kakap, dengan slogan "Let's get closer to morio". Selain mengamati orangutan, pengunjung dapat menikmati keindahan hutan hujan tropis dataran rendah, yang menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa dan pohon-pohon besar. Wisata malam di Prevab menawarkan pengalaman unik melihat aktivitas tarantula dan kehidupan malam hutan yang misterius.

✓ **Sangkima**

Sangkima, objek wisata lainnya, menawarkan akses mudah di km 38 jalan poros Bontang – Sangatta. Dengan hutan alam yang dipenuhi tumbuhan ulin dan berbagai jenis satwa liar, Sangkima menjadi destinasi favorit. Atraksi utama di sini adalah pohon ulin raksasa berusia 1.000 tahun dengan diameter 2,49 meter, yang dapat dijelajahi melalui boardwalk sepanjang 900 meter. Petualangan jelajah hutan dan jembatan goyang menambah sensasi berkeliling Sangkima. Dengan slogan "The wonder of giant ironwood", kawasan ini menyajikan canopy trail dan rumah pohon yang menarik bagi para petualang.

✓ **Bontang Mangrove Park**

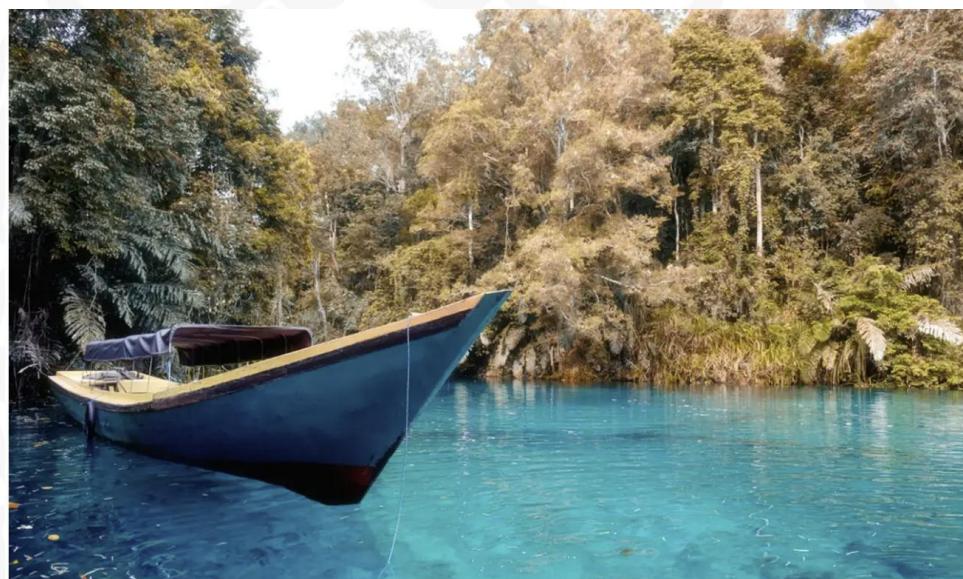
Bontang Mangrove Park, terletak di Kota Bontang, memberikan nuansa berbeda di tengah kawasan industri. Dengan slogan "Feel the breeze, refresh your mind", kawasan ini menggabungkan konservasi, edukasi, dan rekreasi. Jalur kayu ulin sepanjang 2,5 km memungkinkan wisatawan menikmati vegetasi mangrove yang beragam dan unik. Suara merdu burung remetuk laut, keceriaan burung cekakak sungai, dan anggunnya bangau tongtong menjadi hiburan alami. Menara pandang menawarkan pemandangan indah kawasan mangrove dan laut di sekitar Bontang Mangrove Park, sementara bumi perkemahan yang tertata rapi menambah kenyamanan pengunjung.

✓ **Gua Lubang Angin dan Gua Sampe Marta**

Gua Lubang Angin dan Gua Sampe Marta menambah keunikan Taman Nasional Kutai dengan ekosistem karst yang mempesona. Gua Lubang Angin, dengan lorong-lorong besar dan kedalaman hingga 219 meter, menawarkan angin yang berhembus melalui banyak lubang muara. Stalagmit besar yang masih hidup di lorong utama menambah daya tarik. Gua Sampe Marta, dengan aliran air yang mengalir dari dalam gua, menawarkan petualangan menelusuri lorong-lorong sempit dengan ornamen gua yang indah.

Taman Nasional Kutai adalah permata alam yang menawarkan keindahan dan keunikan hutan hujan tropis Kalimantan. Keberagaman hayati, keindahan alam, dan atraksi menarik menjadikan taman nasional ini sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi, seperti yang direkomendasikan oleh Lonely Planet. Setiap sudut Taman Nasional Kutai menyimpan keajaiban alam yang siap dijelajahi dan dinikmati.

4) Danau Labuan Cermin



Destinasi wisata di kepulauan Derawan selanjutnya yang tak kalah menarik adalah Danau Labuan Cermin. Sesuai namanya, objek wisata di Derawan satu ini memang terkenal akan kejernihan airnya yang bak cermin.

Untuk bisa mencapai Danau Labuan Cermin, Toppers akan menjelajahi sungai yang ditumbuhi rimbunnya bakau. Berenang di Labuan Cermin yang jernih tentu takkan gagal segarkan kembali pikiranmu.

3. Perkebunan

1) Kelapa Sawit

Jenis tanaman perkebunan yang ada pada Kalimantan Timur antara lain; Karet, Kelapa, Kopi, Lada, Coklat, Kelapa Sawit, Gula Aren dan lainnya, yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Usaha perkebunan ini terbagi menjadi perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.



Areal perkebunan Kalimantan Timur seluas 1.131. 439 ha dengan Produksi 5.871.015 Ton. Wilayah terbesar dari luas perkebunan telah ditanami oleh kelapa sawit. Produksi kelapa Sawit mencapai 5.734.464 Ton dari total luas tanaman 961. 802 ha. Produksi terbesar kedua adalah Karet sebesar 77.191 ton dan perkebunan kelapa 24.510 ton dari luas tanah 91.784 ha dan 30.703 ha. Tercatat pada perkebunan Produksi kelapa sawit mencapai 273.183 ton dari luas tanaman 17.237 h. sementara perkebunan besar swasta tercatat 4.357.752 ton produksi kelapa sawit dengan luas 717.845 ha dan perkebunan rakyat memproduksi 1.103.529 ton. Dari tahun ke tahun luas kebun kelapa sawit selalu meningkat sejalan dengan program gubernur dalam upaya meluncurkan program Satu juta Hektar Kelapa Sawit.

2) Budidaya Komoditi Kelapa



Bagi masyarakat Indonesia, Kelapa merupakan bagian dari kehidupan karena semua bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonom, sosial dan budaya. Sesuai kondisi lahan Kalimantan Timur yang Potensial untuk

penanaman kelapa, jagung yang cocok untuk dikombinasikan dengan pertanaman kelapa. Masyarakat mengelola tanaman kelapa merupakan komoditi utama yang tumbuh dengan baik pada semua tempat sebagai tanaman pekarangan. Usaha perkebunan Kelapa ini telah mencatat sebanyak 38.544 ha dengan jumlah produksi sebanyak 38.670 ton.

3) Budidaya Tanaman Jagung yang Terintegrasi dengan Industri Pakan Ternak



Jagung termasuk Komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia. Mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna baik untuk pangan maupun pakan. jagung sebagai bahan utama makanan hewan ternak dan juga menjadi tepung jagung (Corn Starch) untuk produk makanan minuman, kertas dan farmasi. penggunaan jagung untuk menjadi pakan ternak telah mencapai 50% dari total kebutuhan. Konsumsi Jagung untuk pakan cenderung dengan rata-rata per tahun sebesar 11,52%, Sementara itu pertumbuhan produksi hanya 6,11%. Jagung juga adalah bahan baku utama Industri pakan ternak yang pertumbuhannya semakin meningkat. kecenderungan konsumsi jagung Indonesia juga makin tinggi dari peningkatan produksi, menyebabkan makin besarnya jumlah impor dan makin kecilnya ekspor. Luar areal penanaman Jagung adalah 9.975 ha yang tersebar pada seluruh kabupaten dan kota dengan produksi mencapai 11.620 ton.

4) Budidaya Kakao



Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan agroindustri. Indonesia masih memiliki lahan potensial yang cukup besar untuk pengembangan kakao yaitu lebih dari 6.2 juta ha yang terdapat pada Irian Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. Kalimantan Timur Merupakan Provinsi yang mempunyai Potensi Besar bagi perkembangan Komoditi Kakao Indonesia. Komoditas kakao cukup penting bagi perekonomian Nasional dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara, pengembangan wilayah dan agroindustri. Kebutuhan Kakao untuk industri makanan dan minuman semakin meningkat.

5) Komoditi Ekspor Karet Alam



Karet merupakan komoditas yang elastis dalam kontribusinya terhadap pasar. Produk utama tanaman karet alam adalah getah karet. Areal penanaman karet Indonesia dan kalimantan timur hingga kini masih menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Kalimantan dengan iklim tropis basah sangat cocok untuk pertumbuhan dan pengembangan tanaman karet. Hasil analisis finansial terhadap komoditas karet alam menunjukkan bahwa budidaya karet sangat layak berkembang. Dari aspek teknis budidaya, komoditas ini relatif sederhana.

6) Potensi dan Komoditi Pisang



Pisang merupakan komoditi pertanian rakyat kalimantan timur yang pada 5 tahun terakhir ini menarik perhatian pertani. Pemerintah Kalimantan Timur telah mendorong pengembangan komoditi pisang ini menjadi komoditas andalan yang dipasarkan secara nasional maupun Ekspor. Komoditas

pisang ini menjadi penghasil PAD bagi kalimantan timur ataupun devisa negara. Seluruh kabupaten Kalimantan Timur mempunyai Potensi untuk menjadi Sentra pengembangan budidaya pisang maupun daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Nunukan, Balikpapan dan Samarinda.

4. Pertanian



Perkembangan luas panen, produksi padi serta hasil per hektar Kalimantan Timur pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Secara riil luas panen padi naik dari 140.215 ha menjadi 142.573 ha. Kemudian untuk hasil per hektarnya meningkat menjadi 39,42 kuintal per hektar. Daerah kabupaten/kota yang memiliki luas panen dan produksi padi (Sawah+ladang) terbesar adalah kabupaten Kutai Kartanegara. Sekitar 36% produksi padi Kalimantan Timur telah dihasilkan oleh kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan untuk jenis padi sawah produksi dari Kutai Kartanegara mencapai 45,35% dari total padi sawah Kalimantan Timur.

Tanaman Palawija Kalimantan Timur antara lain adalah jagung ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Hampir semua komoditi palawija tersebut mengalami peningkatan luas panen dari tahun ke tahun. Pada jenis tanaman sayur-sayuran dan perkembangannya sangat fluktuatif. Jenis tanaman sayuran yang terbanyak oleh provinsi kalimantan timur adalah ketimun dan kangkung.

1) Kawasan Budidaya Pertanian berbasis Padi

Pertanian adalah salah satu sektor yang paling tahan dan elastis terhadap fluktuasi ekonomi internasional. Saat Investasi, Manufaktur, dan indikator moneter kolaps, sektor pertanian tetap elastis karena kebutuhan dan aksesibilitasnya yang relatif mudah menjadi pokok utama ekonomi rakyat. Kondisi pembangunan Indonesia saat ini adalah dalam rangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan melalui program Panca Yasa.

Program ini terdiri dari atas pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan petani, revitalisasi, tenaga penyuluh pertanian, perbaikan akses petani dalam sistem biaya, menyempurnakan sistem pasar produk-produk pertanian yang menguntungkan petani. Maka kebijakan pembangunan pertanian tak hanya berorientasi pada produksi melainkan pada kesejahteraan petani melalui pengolahan skala besar yang terintegrasi dengan industri.

Wilayah Kalimantan Timur seperti kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, memiliki potensi yang sangat besar. Para investor tak perlu ragu menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam bidang ini karena dari segi aspek teknis dan ekonomis serta dukungan pemerintah daerah setempat yang kuat akan memudahkan usaha industri pertanian berbasis padi yang terintegrasi dengan industri pengolahan.

2) Singkong Gajah, Limbah Sawit dan Kelapa Dalam



Pengembangan bioenergi yang dalam hal ini merupakan pengembangan energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti jarak, kelapa sawit, tebu, singkong, jagung dan lain-lain serta biomassa. Produk bioenergi dapat berupa bahan bakar padat nabati bahan nabati cair, bahan bakar gas nabati dan biolistrik.



Meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari seluruh kalangan masyarakat tak hanya menimbulkan permasalahan, namun juga memberikan peluang bisnis bagi produsen energi alternatif.

Beragam penelitian pun mulai berkembang untuk mendapatkan sumber daya energi pengganti yang harganya relatif murah dan pastinya ramah lingkungan. Sebut saja bioetanol singkong gajah yang kini mulai berkembang dari berbagai belahan dunia sebagai pengganti bahan bakar minyak.

5. Perikanan.



Jumlah rumah tangga perikanan mengalami peningkatan karena adanya reklamasi lahan dari batu bara menjadi area danau untuk perikanan. Fenomena ini terjadi pada daerah Nunukan, Kutai Timur dan Berau. Produksi perikanan mengalami peningkatan 16% dari 378.830,3 ton menjadi 438.744 ton. Sarana penangkapan ikan laut pada tahun 2012 terdiri dari perahu tanpa motor, perahu motor dan kapal motor. Jumlah total armada pada tahun 2012 sebanyak 27.518 unit.

Ikan kerapu merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena permintaan pasar dunia maupun domestik cukup tinggi. Rasa dagingnya yang lezat membuat ikan kerapu ini memiliki nilai jual yang tinggi. Usaha budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) ikan kerapu memiliki unit pemberian. 13 unit keramba (pendederan/penggelondongan) dan 10 unit keramba pembesaran ikan kerapu merupakan komoditas unggulan yang prospektif untuk dikembangkan. Prospek budidaya ikan kerapu ini terjadi karena meningkatnya permintaan pasar baik luar negeri maupun domestik. Pasar luar negeri yang prospektif adalah Hongkong, Singapura dan Jepang. Ikan kerapu tergolong susah untuk dibudidayakan namun setelah meninjau aspek teknis, Kalimantan Timur khususnya daerah perairan Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau layak

untuk pengembangan budidaya ikan kerapu, terbukti dengan semakin banyaknya nelayan yang mengusahakannya.

6. Peternakan



Jenis peternakan Kalimantan Timur ini sangat bervariasi. Jumlah ternak terdiri dari 7 jenis ternak yaitu ternak Sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi dan kuda. Sedangkan ternak potong terdiri dari 5 jenis yaitu Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan babi. Pemotongan hewan ternak untuk konsumsi bisa melalui rumah potong hewan maupun dari luar rumah potong hewan. Kontribusi daging sapi terhadap produksi daging merupakan yang terbanyak. Untuk jenis unggas Kalimantan Timur membudidayakan ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Adapun unggas terbanyak yaitu berjumlah 39.474.540 ekor.

1) Kerbau Kalang

Kerbau Rawa (Bubalus Bubalis) atau kerbau kalang ini merupakan salah satu komoditas peternakan yang potensial dalam hal penyediaan daging, karena kemampuan ternak kerbau yang mampu mencerna serat kasar lebih baik dari ternak sapi dengan kondisi pakan yang memiliki kualitas rendah. Komoditas Kerbau kalang ini dibudidayakan secara komersial untuk tercapainya swasembada daging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pada usaha kerbau kalang ini sangat prospek dan menguntungkan.

2) Sapi Potong

Keberlangsungan suatu usaha pengembangan sapi potong harus memperlihatkan bibit atau ternak bakalan. Bibit sapi dapat berasal dari impor, maupun sapi lokal. Sumber bibit sapi potong lokal berasal dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, NTB, Jawa Timur. Usaha penggemukan sapi potong telah berdiri sebanyak 35 Unit yang tersebar pada 11 Kabupaten dan kota. Pada umumnya tempat pengembangan usaha sapi rakyat ini terletak pada Kabupaten Penajam Paser Utara.

3) Ayam Petelur

Pengembangan pengusahaan ternak ayam ras petelur memiliki prospek bisnis yang menguntungkan karena permintaan yang selalu meningkat dan peluang pasar telur ayam ras masih

terbuka. Wilayah timur seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kertanegara memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan Ayam Petelur.

7. Pertambangan



Kegiatan pertambangan Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan nonmigas. Dari kegiatan tersebut minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama. Listrik adalah kebutuhan utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia saat ini. Tanpa listrik, banyak usaha, rumah tangga maupun sektor lain mengalami kelumpuhan. Sebagian besar sumber energi listrik Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih terpasok dari Perusahaan Umum Listrik negara (PLN).

1) Batubara

Batubara, sebagai salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan kandungannya, batubara dapat dikelola menjadi sumber daya energi baru melalui proses gasifikasi dan likuifikasi. Salah satu proses gasifikasi batubara adalah Coal Bed Methane (CBM). CBM saat ini sangat banyak membantu Industri, rumah tangga bahkan telah berkembang menjadi pembangkit listrik. Sementara Produk yang menghasilkan BBM adalah dengan proses pencairan batubara (liquefaction coal). Kalimantan Timur memiliki cadangan batubara yang relatif besar, sangat memungkinkan untuk menghasilkan bahan bakar minyak pengganti (sumber energi alternatif) dengan memanfaatkan teknologi pencairan batubara untuk menjadi bahan bakar minyak. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha batubara cair layak produksi

jika ada diversifikasi produk dan jaminan produk diatas harga yang berlaku.

2) Lahan Eks Tambang

Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa macam yang meliputi tambang emas, tambang minyak, tambang batubara. Areal pertambangan yang berkembang cukup pesat dan mengalami perluasan area eksplorasi wilayah kalimantan Timur adalah tambang batubara. setelah era penebangan hutan dan industri kayu. Proses kegiatan tambang batubara menggunakan teknik penambangan terbuka (Open pit mining) dengan metode gali-isi kembali (Back Fillings Method).

Lahan bekas tambang batu bara ini tiap tahunnya mengalami peningkatan perluasan wilayah areal penambangan. Sehingga perlu adanya proses identifikasi, karakteristik dan evaluasi potensi lahan bekas tambang. Sebagai rekomendasi pemanfaatan lahan eks tambang Kalimantan Timur yang berguna sebagai areal pertanian dan subsektor peternakan dalam rangka program ketahanan pangan. Hal ini juga berguna untuk menentukan arahan manfaatnya yang telah diverifikasi berdasarkan keadaan potensi lahan dan aksesibilitas lokasi.

3) Gas Metana sebagai pembangkit listrik

Tenaga listrik merupakan kebutuhan dasar manusia saat ini sebagai penunjang aktivitas masyarakat, oleh karena itu tenaga listrik sangat penting dan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu juga menopang kegiatan ekonomi domestik.

Kebutuhan tenaga listrik Kalimantan Timur telah terpasok melalui jaringan Transmisi 150 kV yaitu sistem Mahakam dan beberapa sistem terisolasi yaitu sistem Nunukan, Sangatta, Petung, Long ikis, Bulungan, Tanjung Redeb, Bontang, Tanah Grogot, Malinak, Kota Bangun, Melak, Kerang, Muara Komam, Sebatik, Tanjung Selor, Batu Sopang, dan Tanjung Aru. Dari 18 Sistem yang memasok listrik, 14 sistemnya telah berada dalam kondisi Surplus. Salah satu sumber daya gas bumi dapat memenuhi kebutuhan energi adalah Coal Bed Methane (CBM) atau gas metana batubara. Gas hidrokarbon dan teradopsi.

2.5 Gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kaltim

1. Dasar Pembentukan.

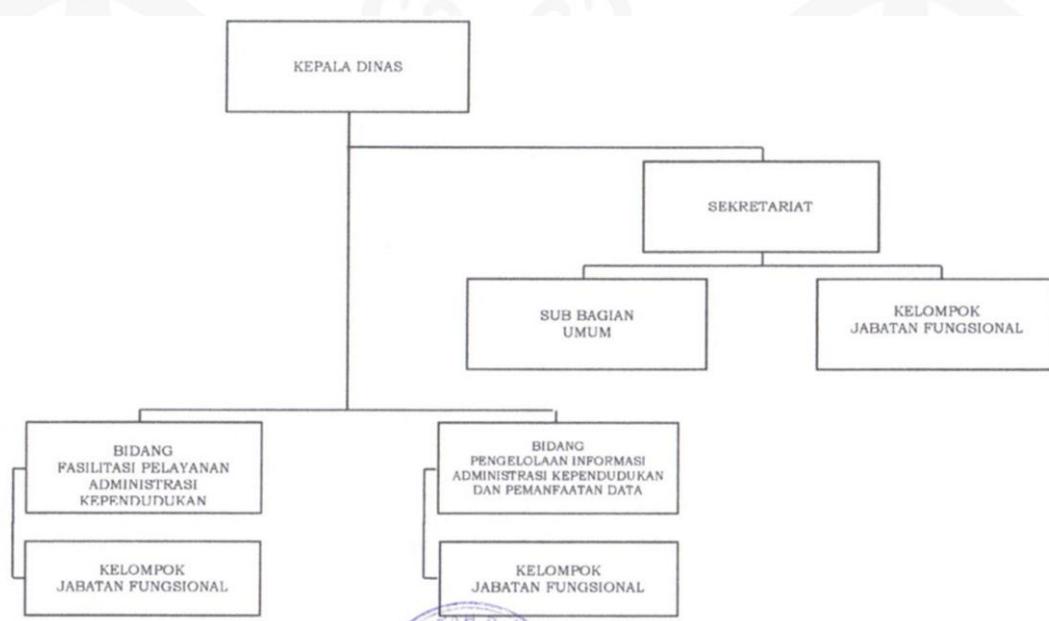
Pembentukan Disdukcapil Provinsi Kaltim sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43

Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI DISDUKCAPIL PROV. KALTIM



3. Tugas Pokok Dan Fungsi

1) Tugas Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi

kependudukan dan pemanfaatan data;

- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya..

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi mempunyai tugas :

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
- f. penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
- g. pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pendokumentasian penyelenggaraan administrasi kependudukan; pembinaan urusan
- h. bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan;
- i. pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

2) Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
- d. agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik Daerah;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- h. fasilitasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
- i. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- j. pembinaan dan koordinasi perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat membawahi sub bagian umum :

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyediaan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian umum berdasarkan rencana operasional/program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, bahan penyusunan program dan anggaran, pelaporan kinerja, bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
- g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- h. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai, bahan tanggapan pemeriksaan, bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan persuratan;
- i. pelaksanaan urusan kerumah-tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor, pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik Daerah, laporan kinerja pejabat struktural, serta urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bina aparatur pendaftaran penduduk;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bina aparatur pencatatan sipil;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

- f. pengaturan teknis monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bina aparatur pendaftaran pendudukbahan dan bina aparatur pencatatan sipil;
- g. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pelaksanaan evaluasi pelaporan bina aparatur pendaftaran penduduk, bina aparatur pencatatan sipil dan monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- i. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan program kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi pendaftaran meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
- f. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pewarganegaraan;
- h. pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,

pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan pemerganegaraan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, dan pemerganegaraan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kerja sama dan inovasi pelayanan;
- f. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis monitoring dan evaluasi;
- g. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- i. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berdasarkan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengarahkan penyusunan peraturan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- e. mengarahkan rencana kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- f. mengendalikan pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- g. mengoordinasikan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- h. mengoordinir kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

3.1 Kuantitas Penduduk

3.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

1. Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

Tabel III.1
Penduduk Menurut Jenis Kelamin

WILAYAH	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
PASER	160.276	51,76	149.391	48,24	309.667	7,55
KUTAI KARTANEGARA	420.744	52,14	386.220	47,86	806.964	19,66
BERAU	158.927	53,15	140.078	46,85	299.005	7,29
KUTAI BARAT	98.069	52,56	88.512	47,44	186.581	4,55
KUTAI TIMUR	240.268	53,53	208	46,51	429.640	10,47
PENAJAM PASER UTARA	104.765	51,85	97.302	48,15	202.067	4,92
MAHKAM ULU	21.192	53,36	18.523	46,64	39.715	0,97
KOTA BALIKPAPAN	387.112	51,11	370.306	48,89	757.418	18,46
KOTA SAMARINDA	448.161	50,86	433.064	49,14	881.225	21,47
KOTA BONTANG	99.151	51,69	92.660	48,31	191.811	4,67
TOTAL	2.138.665	52,11	1.776.264	43,28	4.104.093	100

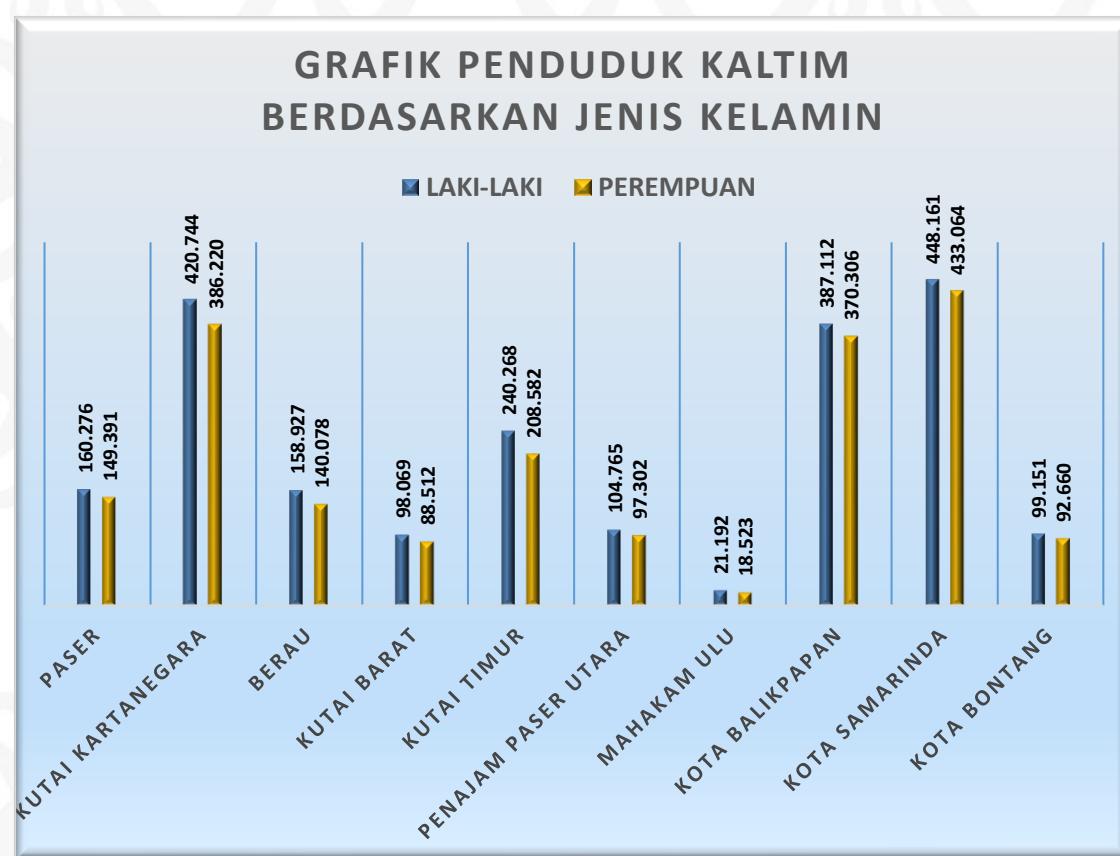
Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah



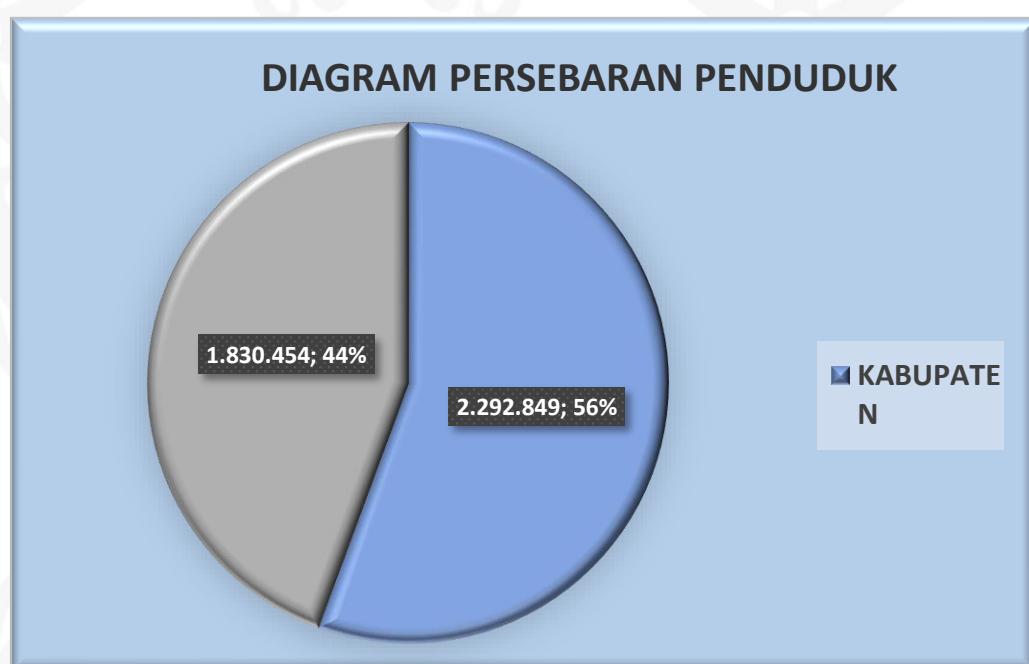
Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dengan rata-rata persentase jumlah laki-laki sebanyak 52,1% sedangkan persentase jumlah Perempuan sebanyak 48,15%. Gambaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini dapat terlihat pada seluruh

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Samarinda, dengan jumlah penduduk sebanyak 881.225 jiwa, terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 448.161 dengan persentase 50,86% dan jumlah perempuan sebanyak 433.064 dengan persentase 49,14%, yang dimana memiliki persentase 21,47% dari total penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sejumlah 39.715 jiwa, yang terdiri dari 21.192 penduduk laki-laki dengan persentase 53,36% dan 18.523 penduduk perempuan dengan persentase 46,63% atau 0,97% dari total penduduk se Kalimantan Timur.

Gambar III.1
Grafik Penduduk Kaltim berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar III.2
Diagram Persebaran Penduduk



Jika dilihat dari Diagram Persebaran Penduduk di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan wilayah berdasarkan Kabupaten dan Kota dapat terlihat jika lebih banyak penduduk yang tinggal di Kabupaten dibandingkan di Kota. Jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten memiliki 2.292.849 jiwa dengan persentase 56% sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di Kota memiliki 1.830.454 jiwa dengan persentase 44%.

2. Rasio Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota

Tabel III.2

Rasio Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREM-PUAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
1	PASER	160.276	149.391	309.667	10.708.203	28,92
2	KUTAI KARTANEGARA	420.744	386.220	806.964	26.926.494	29,97
3	BERAU	158.927	140.078	299.005	21.008.640	14,23
4	KUTAI BARAT	98.069	88.512	186.581	13.769.367	13,55
5	KUTAI TIMUR	240.268	208.582	448.850	31.580.182	14,21
6	PENAJAM PASER UTARA	104.765	97.302	202.067	3.173.304	63,68
7	MAHKAM ULU	21.192	18.523	39.715	18.427.794	2,16
8	KOTA BALIKPAPAN	387.112	370.306	757.418	509.702	1.486
9	KOTA SAMARINDA	448.161	434.064	881.225	716.783	1.229,42
10	KOTA BONTANG	99.151	92.660	191.811	160.810	1.192,78
JUMLAH		2.138.665	1.984.638	4.123.303	126.981.279	32,47

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Angka kepadatan penduduk merupakan sebuah perbandingan antara jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km²). Angka kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 32,47 jiwa, yang berarti bahwa setiap km² dihuni oleh 32-32,47 jiwa.

Jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kota Balikpapan yaitu 1.486 jiwa per km². Kota Balikpapan sendiri memiliki luas wilayah terkecil kedua di Kalimantan Timur yaitu seluas 509.702 km², setelah Kota Bontang dengan luas 160.810 km². Selain itu juga Kota Balikpapan memiliki daya tarik tersendiri bagi pendatang, karena Kota tersebut masih memiliki banyak perusahaan dengan skala nasional maupun internasional. Selain karena memiliki banyak perusahaan, Kota Balikpapan juga memiliki Bandara yang biasa dikenal sebagai Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang merupakan Bandara terbesar dan juga tersibuk nomor 3 (tiga) di Indonesia, setelah Bandara Soekarno Hatta yang berada di Jakarta dan juga Bandara Juanda yang berada di Kota Surabaya.

Jika Kota Balikpapan merupakan Kota dengan kepadatan penduduk tertinggi, Kabupaten Mahakam Ulu justru sebaliknya. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Pada Kabupaten Mahakan Ulu sendiri memiliki kepadatan penduduk sebesar 2,16 jiwa per km², hal tersebut disebabkan karena luas pada wilayah di Kabupaten ini adalah yang terbesar kelima di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sebesar 18.427.794 km² atau 14,51% merupakan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dari Provinsi Kalimantan Timur. Selain disebabkan oleh luas wilayah, ada beberapa penyebab mengapa Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah adalah karena Kabupaten Mahakan Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat dengan kondisi geografis yang

sulit dijangkau dan keterbatasan pembangunan infrastruktur. Tetapi seiring dengan berjalannya pembangunan infrastruktur diharapkan pembangunan di Kabupaten Mahakan Ulu akan semakin maju dan semakin merata.

Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kabupaten/Kota

Tabel III.3

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kabupaten/Kota

KABUPATEN / KOTA	PENDUDUK KALTIM TAHUN 2023			PENDUDUK KALTIM TAHUN 2024			PERTAMBAHAN PENDUDUK 2023 - 2024	PERTUMBUHAN PENDUDUK 2023-2024
	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL		
PASER	156.903	146.521	303.424	160.276	149.391	309.667	6.243	2,06
KUTAI KARTANEGARA	410.731	377.382	788.113	420.744	386.220	806.964	18.851	2,39
BERAU	149.271	131.727	280.998	158.927	140.078	299.005	18.007	6,41
KUTAI BARAT	94.596	85.523	180.119	98.069	88.512	186.581	6.462	3,59
KUTAI TIMUR	229.815	199.825	429.640	240.268	208.582	448.850	19.210	4,47
PENAJAM PASER UTARA	101.816	94.750	196.566	104.765	97.302	202.067	5.501	2,80
MAHKAM ULU	20.553	17.945	38.498	21.192	18.523	39.715	1.217	3,16
BALIKPAPAN	377.458	361.074	738.532	387.112	370.306	757.418	18.886	2,56
SAMARINDA	438.477	423.401	861.878	448.161	433.064	881.225	19.347	2,24
BONTANG	98.222	91.746	189.968	99.151	92.660	191.811	1.843	0,97
JUMLAH	2.077.842	1.929.894	4.007.736	2.138.665	1.984.638	4.123.303	115.567	2,88

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang bernilai positif artinya terdapat penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya, sedangkan apabila laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif maka terdapat pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika untuk Provinsi Kalimantan Timur, angka pertumbuhan penduduk pada setiap kabupaten/kota bernilai positif, artinya terdapat penambahan penduduk pada setiap kabupaten/kota dari tahun sebelumnya.

Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada Kabupaten Berau yaitu sebesar 6,41%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat pada Kota Bontang dengan angka 0,97%. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor-faktor non demografis antara lain kesehatan dan tingkat pendidikan.

3.1.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Karakteristik penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, dapat berguna dalam membantu proses penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar, bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan

kelompok umur masing-masing, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Dalam setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Selain bayi dan balita ada penduduk perempuan remaja, mereka mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan, agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Jika dikaitkan dengan median atau nilai tengah pada usia penduduk, maka median atau nilai tengah usia penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 adalah 42,8 tahun yang berarti setengah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 berusia dibawah 40 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 40 tahun. Dengan kata lain, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dikategorikan sebagai penduduk *intermediate* yaitu transisi dari muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

Tabel III.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

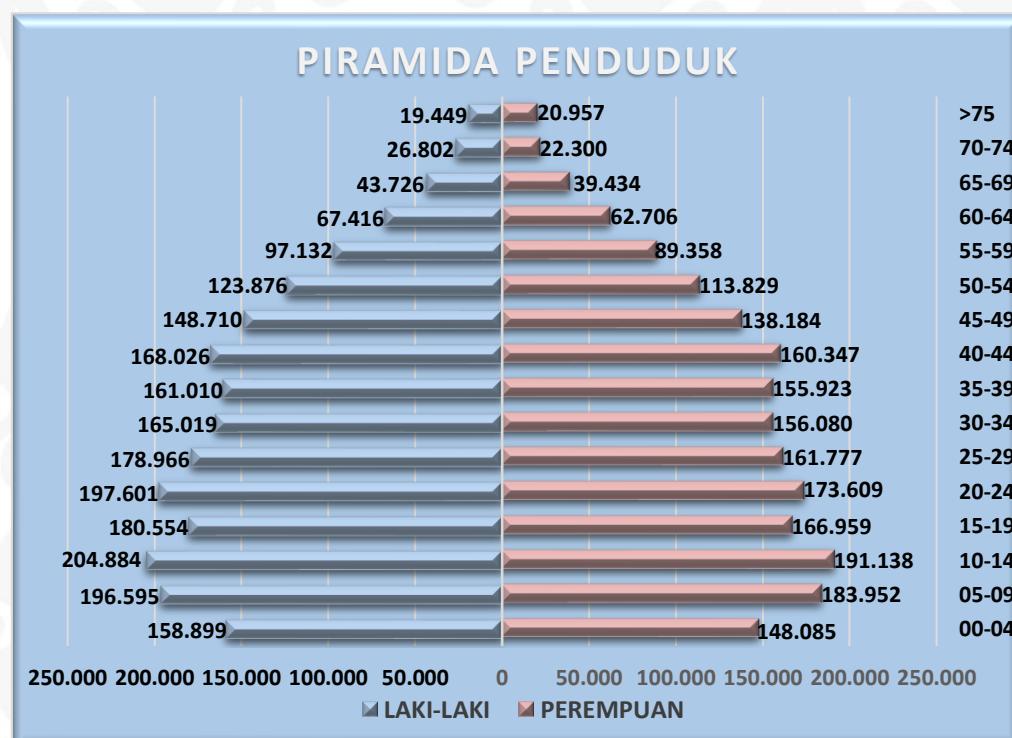
KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
00-04	158.899	51,76	148.085	48,24	306.984	7,45
05-09	196.595	51,66	183.952	48,34	380.574	9,23
10-14	204.884	51,74	191.138	48,26	396.022	9,60
15-19	180.554	51,96	166.959	48,04	347.513	8,43
20-24	197.601	53,23	173.609	46,77	371.210	9,00
25-29	178.966	52,52	161.777	47,48	340.743	8,26
30-34	165.019	51,39	156.080	48,61	321.099	7,97
35-39	161.010	50,80	155.923	49,20	316.933	7,69
40-44	168.026	51,17	160.347	48,83	328.373	7,96
45-49	148.710	51,83	138.184	48,17	286.894	6,96
50-54	123.876	52,11	113.829	47,89	237.705	5,76
55-59	97.132	52,08	89.358	47,92	186.490	4,52
60-64	67.416	51,81	62.706	48,19	130.122	3,16
65-69	43.726	52,58	39.434	47,42	83.160	2,02
70-74	26.802	54,58	22.300	45,42	49.102	1,19
>75	19.449	48,13	20.957	51,87	40.406	0,98
JUMLAH	2.138.665	51,87	1.984.638	48,13	4.123.330	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar merupakan usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15 – 64 tahun, yang memiliki persentase (69,53%) dengan komposisi terbesar pada penduduk berusia 20 – 24 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada kelompok penduduk usia produktif, terlihat bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan yang terbesar berada pada kelompok usia 20 – 24 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi dimana hal ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (di atas 50%) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 26,28% merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun), dan 4,19% yang merupakan Penduduk lanjut usia (65 tahun keatas). Jumlah penduduk usia muda saat ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi *entry* tenaga kerja baru, yang memerlukan *skill* dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian.

Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai, serta pembentukan karakter dan etos kerja yang baik. Sehingga ketika nantinya mereka memasuki dunia kerja, mereka mampu memperoleh peluang kerja baik yang sudah tersedia, bahkan mereka mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Di sisi lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga harus mampu menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Struktur usia penduduk Provinsi Kalimantan Timur menurut jenis kelamin, dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur.

Gambar III.3
Diagram Piramida Penduduk Kalimantan Timur



Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk dengan kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida dengan persentase 7,45 %. Selain itu terlihat jumlah penduduk dengan kelompok umur 5-9 tahun terlihat lebar, yang berarti pada lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan juga menengah yang cukup untuk menampung jumlah penduduk pada kelompok ini. Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 20-24 tahun, yang menunjukkan jumlah penduduk yang besar. Penduduk pada kelompok umur ini, diperkirakan merupakan penduduk yang lahir pada tahun 1999-2002 yang akan mulai memasuki usia 20-24 tahun. Selain itu juga ditambah dengan migran yang masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, dikarenakan Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang strategis dan kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) serta banyak kawasan industri tersebar di Kalimantan Timur merupakan daya tarik tersendiri. Penduduk lansia (65 tahun keatas), menunjukkan proporsi yang masih kecil, yaitu 4,19%, namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)



Rasio Jenis Kelamin (RJK) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap setiap 100 orang penduduk perempuan. Rasio Jenis kelamin berguna untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti

penyediaan Rumah Sakit Bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. Rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Timur sebesar 108 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 orang penduduk laki-laki. Berbeda dengan gambaran rasio jenis kelamin secara nasional dimana lebih banyak penduduk perempuan dibanding laki-laki.

Rasio jenis kelamin penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 107 yang artinya terdapat 107 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki rentan terhadap kematian dibandingkan bayi perempuan. Pada tabel Rasio Jenis Kelamin terlihat bahwa di Kalimantan Timur jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih besar dari jumlah bayi perempuan.

Tabel III.5
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH L + P	SEX RATIO
00-04	158.899	7	148.085	7	306.984	107
05-09	196.595	9	183.952	9	380.574	107
10-14	204.884	10	191.138	10	396.022	107
15-19	180.554	8	166.959	8	347.513	108
20-24	197.601	9	173.609	9	371.210	114
25-29	178.966	8	161.777	8	340.743	111
30-34	165.019	8	156.080	8	321.099	106
35-39	161.010	8	155.923	8	316.933	103
40-44	168.026	8	160.347	8	328.373	105
45-49	148.710	7	138.184	7	286.894	108
50-54	123.876	6	113.829	6	237.705	109
55-59	97.132	5	89.358	5	186.490	109
60-64	67.416	3	62.706	3	130.122	108
65-69	43.726	2	39.434	2	83.160	111
70-74	26.802	1	22.300	1	49.102	120
>75	19.449	1	20.957	1	40.406	93
JUMLAH	2.138.665	100	1.984.638	100	4.123.330	108

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur di tiap Kabupaten/Kota rata-rata di atas 100 %, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur tertinggi terdapat pada kelompok umur 70-74 sebesar 120 artinya setiap 100 orang perempuan pada kelompok umur 70-74 tahun terdapat 120 laki-laki kelompok umur 70-74 tahun. Sedangkan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur terendah terdapat pada kelompok umur 75 tahun keatas yaitu sebesar 93.

Tabel III.6
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				SEX RATIO
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	
PASER	160.276	7	149.391	8	107
KUTAI KARTANEGARA	420.744	20	386.220	20	109
BERAU	158.927	7	140.078	7	113
KUTAI BARAT	98.069	5	88.512	5	111
KUTAI TIMUR	240.268	11	208.582	11	115
PENAJAM PASER UTARA	104.765	5	97.302	5	108
MAHKAM ULU	21.192	1	18.523	1	114
KOTA BALIKPAPAN	387.112	18	370.306	19	105
KOTA SAMARINDA	448.161	21	433.064	22	103
KOTA BONTANG	99.151	5	92.660	5	107
JUMLAH	2.138.665	100	1.948.638	100	108

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Rasio jenis kelamin di tiap Kabupaten/Kota di atas 100, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jika diamati masing-masing Kabupaten/Kota, Kabupaten Kutai Timur mempunyai rasio tertinggi sebesar 115 berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 115 penduduk laki-laki, sedangkan Kota Samarinda mempunyai rasio terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yaitu sebesar 103 artinya setiap 100 orang perempuan di Kota Samarinda terdapat 103 penduduk laki-laki.

3. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*).



Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi

Tabel III.7
Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur

KABUPATEN/KOTA	USIA ANAK	USIA PRODUKTIF	USIA LANJUT	DEPENDENCY RATIO
PASER	83.886	214.012	11.769	45
KUTAI KARTANEGARA	215.637	557.742	33.585	45
BERAU	82.754	206.509	9.742	45
KUTAI BARAT	47.166	130.245	9.170	43
KUTAI TIMUR	125.490	309.938	13.422	45
PENAJAM PASER UTARA	53.638	138.646	9.783	46
MAHKAM ULU	9.917	27.588	2.210	44
BALIKPAPAN	192.912	527.221	37.285	44
SAMARINDA	221.870	619.842	39.513	42
BONTANG	50.283	135.339	6.189	42
TOTAL	1.083.553	2.867.082	172.668	44

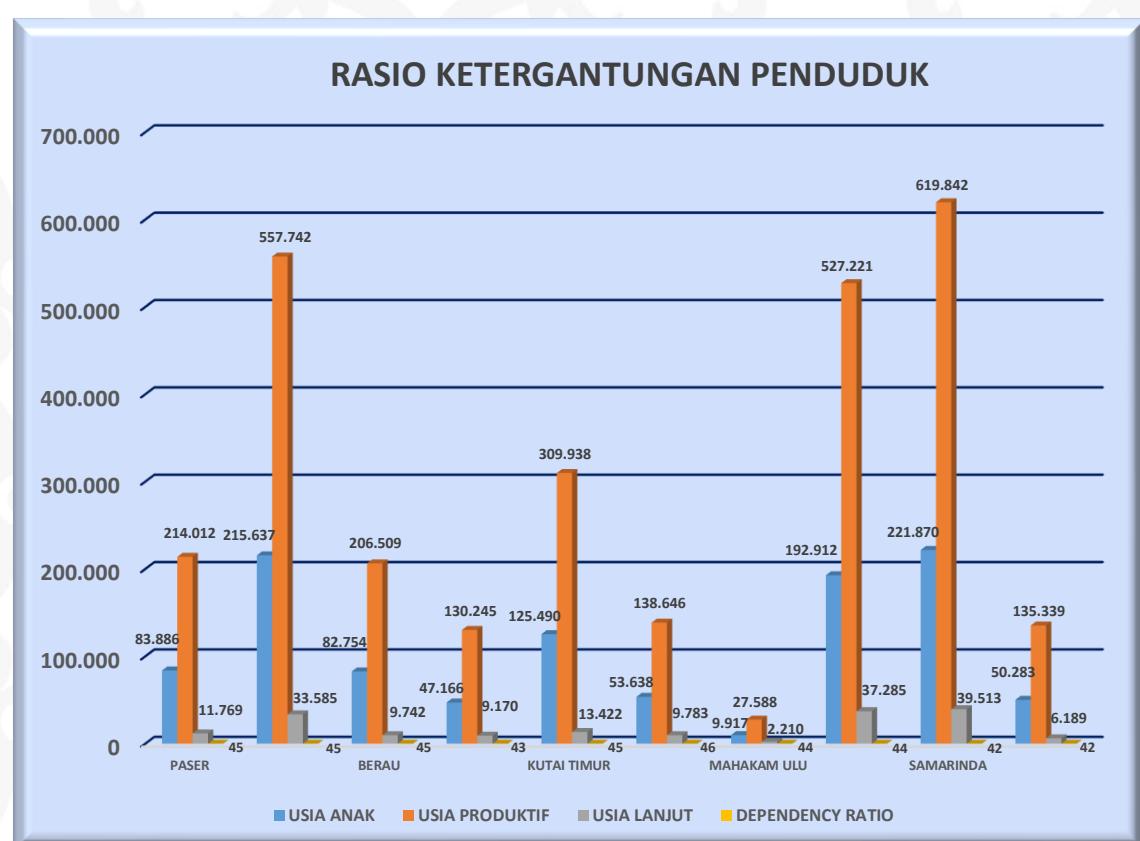
Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan didapat dengan membagi total jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan Kalimantan Timur secara umum sebesar 44. Artinya setiap 100 penduduk usia Produktif Kalimantan Timur menanggung 44 orang usia non produktif baik anak-anak maupun penduduk tua. Angka ini terbilang cukup rendah karena masih dibawah 50. Usia penduduk tua

(>65 tahun) secara persentase terhadap jumlah penduduk di Kalimantan Timur kecil hanya (4,19%) akan tetapi secara jumlah cukuplah besar, sebanyak 172.668 jiwa. Tingginya jumlah penduduk usia lanjut ini perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur untuk penduduk lansia, seperti panti jompo, rumah sakit dan sebagainya.

Kalau dilihat dari tabel penduduk non produktif, Kota Samarinda didominasi oleh penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 221.870 jiwa. Untuk Kabupaten/Kota dengan presentase Dependency Ratio atau rasio ketergantungan terendah ada di Kota Samarinda dan juga Kota Bontang dengan Dependency Ratio sebesar 42. Rasio ketergantungan tertinggi ada pada Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 46.

Gambar III.4
Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk



3.1.3 Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

1. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan



dikatakan masih tergolong penduduk dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu hanya tamat SLTP ke bawah 40,04%, pendidikan SLTA 24,65% dan berpendidikan tinggi 7,48% (Diploma ke atas) sisanya 27,83 % belum sekolah.

Pendidikan yang telah dicapai merupakan salah satu dari indikator kualitas suatu penduduk. Jika diamati menurut pendidikan yang diikuti, Provinsi Kalimantan Timur dapat

Tabel III.8
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	597.512	27,94	558.871	28,16	1.156.383	28,05
BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	237.593	11,11	218.738	11,02	456.331	11,07
TAMAT SD/ SEDERAJAT	315.413	14,75	336.641	16,96	652.054	15,81
SLTP/ SEDERAJAT	273.031	12,77	261.757	13,19	534.788	12,97
SLTA/ SEDERAJAT	570.134	26,66	440.538	22,20	1.010.672	24,51
DIPLOMA I/II	5.610	0,26	7.905	0,40	13.515	0,33
AKADEMI/DIPLOMA III/ S. MUDA	27.456	1,28	39.407	1,99	66.836	1,62
DIPLOMA IV/ STRATA I	103.473	4,84	114.964	5,79	218.437	5,30
STRATA II	7.956	0,37	5.595	0,28	13.551	0,33
STRATA III	487	0,02	222	0,01	709	0,02
TOTAL	2.138.665	100	1.984.638	100	4.123.303	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar kalau tidak dibarengi dengan kualitas yang mumpuni akan berdampak buruk, apalagi sekarang ini kita akan menyongsong era digital 4.0 sehingga untuk memperoleh kesempatan kerja semakin ketat, peningkatan pendidikan perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

Kalau kita kelompokan lagi berdasarkan gender atau jenis kelamin, dapat terlihat bahwa yang menempuh pendidikan tinggi (Diploma ke atas) lebih banyak wanita dengan persentase 8,47% dibandingkan laki-laki dengan persentase 6,78%.

Tabel III.9
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
Menurut Tingkat Pendidikan dan Usia Produktif

TINGKAT PENDIDIKAN	KELOMPOK UMUR										USIA PRODUKTIF	%
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		
TIDAK/BELUM SEKOLAH	122.472	33.717	6.972	4.584	4.116	4.512	4.361	4.206	4.991	5.418	195.349	6,89
BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	113.047	100.358	27.824	8.190	9.193	11.321	11.587	11.611	12.439	12.371	317.941	11,21
TAMAT SD/ SEDERAJAT	36.975	49.743	45.094	42.851	56.919	69.186	73.463	65.781	60.147	54.170	554.329	19,54
SLTP/ SEDERAJAT	38.179	78.508	65.193	52.153	52.197	64.130	55.324	46.824	29.591	17.639	499.738	17,62
SLTA/ SEDERAJAT	15.222	98.497	154.093	154.609	140.059	129.960	106.105	83.877	60.187	29.844	972.453	34,29
DIPLOMA I/II	1	88	580	1.234	2.507	2.985	2.170	1.347	1.103	759	12.774	0,45
AKADEMI/DIPLOM A III/ S. MUDA	3	932	8.208	13.021	12.475	11.962	8.149	4.616	2.856	1.857	64.079	2,26
DIPLOMA IV/ STRATA I	17	2.862	28.570	41.058	36.837	32.232	24.090	18.329	14.695	8.220	206.910	7,30
STRATA II	0	14	595	1.656	1.547	1.488	1.678	1.754	1.955	1.430	12.117	0,43
STRATA III	0	3	7	36	38	70	79	122	106	95	556	0,02
TOTAL	325.916	364.722	337.136	319.392	315.888	327.846	287.006	238.467	188.070	131.803	2.836.246	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Kalau dilihat dari tingkat pendidikan dihubungkan dengan usia produktif, kita lihat bahwa 48,37% penduduk usia produktif Kalimantan Timur berpendidikan SLTP ke bawah, hanya 34,29% berpendidikan SLTA dan 10,45% berpendidikan tinggi (Diploma ke atas). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan penduduk usia produktif Kalimantan Timur masih rendah, dan sisanya 6,89% adalah penduduk yang tidak/belum sekolah.

Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan jenjang pendidikan penduduk usia produktif di Kalimantan Timur ini, agar besarnya SDM yang dimiliki menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi beban yang menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.



Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel III.10
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

KAB/KOTA	PASER	KUTAI KARTANEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHKAMAH ULU	BALIKPAPAN	SAMARINDA	BONTANG	TOTAL
JML PENDUDUK	309.667	806.964	299.005	186.581	448.850	202.067	39.715	757.418	881.225	191.811	4.123.303
ISLAM	288.245	744.179	252.241	89.872	366.386	191.257	9.678	682.594	804.197	172.307	3.600.956
%	93,08	92,22	84,36	48,17	81,63	94,65	24,37	90,12	91,26	89,83	87,33
KRISTEN	10.198	43.929	27.113	58.170	43.558	7.624	5.938	52.999	44.904	15.634	310.067
%	3,29	5,44	9,07	31,18	9,7	3,77	14,95	7	5,1	8,15	7,52
KHATOLIK	10.118	15.916	18.696	38.245	36.183	3.015	24.038	14.475	23.087	3.458	187.231
%	3,27	1,97	6,25	20,5	8,06	1,49	60,53	1,91	2,62	1,8	4,54
HINDU	550	2629	258	151	2558	124	56	1420	825	285	8.856
%	0,18	0,33	0,09	0,08	0,57	0,06	0,14	0,19	0,09	0,15	0,21
BUDHA	547	236	663	47	139	45	3	5884	7858	127	15.549
%	0,18	0,03	0,22	0,03	0,03	0,02	0,01	0,78	0,89	0,07	0,38
KHONG-HUCU	0	5	26	0	10	0	0	35	300	0	376
%	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0,03	0	0,01
KEPERCAYAAN	9	70	8	96	16	2	2	11	54	0	268
%	0	0,01	0	0,05	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Dari tabel di atas bahwa persentase pemeluk agama di provinsi Kalimantan Timur Agama sebagai berikut : Islam (87,33%), diikuti agama Kristen (7,52%), Katholik (4,54%), Budha (0,38%), Hindu (0,21%), Aliran Kepercayaan (0,01%), Konghuchu (0,01 %)

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel III.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

PEKERJAAN	KABUPATEN/ KOTA										JUMLAH
	PASER	KUTAI KARTA-NEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHKAM ULU	BALIK - PAPA N	SAMA-RINDA	BON-TANG	
AKUNTAN	1	-	2	-	3	-	-	2	12	8	28
ANGGOTA BPK	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	20
ANGGOTA DPD	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	5
ANGGOTA DPR-RI	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	9	15	20	7	34	25	11	19	16	14	170
ANGGOTA DPRD PROVINSI	2	2	-	1	1	3	-	4	8	-	21
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	15	148	33	7	63	19	-	734	46	47	1.112
APOTEKER	49	94	56	36	50	25	4	162	198	45	719
ARSITEK	3	4	5	-	3	2	1	25	36	6	85
BELUM/TIDAK BEKERJA	84.998	223.697	104.718	56.588	175.801	75.262	8.196	251.093	261.368	43.631	1.285.352
BIARAWAN/ BIARAWATI	11	8	10	19	22	13	4	17	32	-	136
BIDAN	304	550	190	183	411	146	68	467	443	142	2.904
BUPATI	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4
BURUH HARIAN LEPAS	2.032	6.215	7.818	955	4.122	7.937	92	31.448	7.906	2.653	71.178
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	108	340	303	81	129	227	2	207	92	207	1.696
BURUH PETERNAKAN	7	19	12	5	16	12	-	6	23	9	109
BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.224	2.101	1.354	1.038	4.050	2.032	81	336	576	331	13.123
DOKTER	130	244	125	79	175	69	21	930	957	264	2.994
DOSEN	51	219	77	17	88	27	-	627	1.294	43	2.443
GUBERNUR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
GURU	1.907	3.911	1.526	1.419	2.746	921	319	5.693	4.369	1.591	24.402
IMAM MESJID	18	50	30	9	30	19	4	22	59	19	260
INDUSTRI	14	45	27	12	81	33	1	28	66	43	350
JURU MASAK	-	13	11	6	15	10	-	19	26	20	120
KARYAWAN BUMD	154	368	154	80	162	57	4	310	810	132	2.231
KARYAWAN BUMN	1.485	393	373	96	241	155	11	2.724	1.505	2.274	9.257
KARYAWAN HONORER	3.130	7.236	2.666	5.560	4.637	2.153	2.932	2.414	7.307	1.339	39.379
KARYAWAN SWASTA	16.351	87.622	20.664	11.211	51.365	10.548	1.539	119.810	174.434	28.544	522.088
KEPALA DESA	40	87	16	48	45	19	13	-	-	-	268
KEPOLISIAN RI	647	1.118	508	364	442	598	53	3.292	1.673	390	9.085
KONSTRUKSI	13	67	66	16	72	28	-	27	113	56	458
KONSULTAN	11	14	35	4	17	12	3	63	106	18	283
MEKANIK	79	237	305	99	288	144	10	819	407	177	2.565
MENGURUS RUMAH TANGGA	68.601	179.812	60.373	35.258	81.014	44.367	5.021	151.849	171.825	36.056	834.176
NELAYAN/PERIKANAN	4.901	15.406	8.117	2.169	1.642	2.879	8	2.453	830	2.365	40.770
NOTARIS	2	14	5	2	4	8	-	66	65	15	181
PARAJI	5	7	1	-	9	3	-	-	1	2	28
PASTOR	5	2	5	15	12	2	7	4	9	1	62
PEDAGANG	1.228	1.883	1.252	750	1.195	1.055	72	8.850	3.820	668	20.773
PEGAWAI NEGERI SIPIL	4.593	13.390	5.184	3.490	5.281	3.236	956	8.263	18.939	3.354	66.686

PEKERJAAN	KABUPATEN/ KOTA										JUMLAH
	PASER	KUTAI KARTA-NEGARA	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	MAHKAM ULU	BALIK - PAPAKAN	SAMA-RINDA	BON-TANG	
PEKERJAAN LAINNYA	32	25	15	2	31	21	3	82	43	13	267
PELAJAR/MAHASISWA	54.692	143.608	46.477	31.143	49.320	20.945	9.544	118.915	142.477	52.386	669.507
PELAUT	17	107	74	11	59	72	3	462	662	51	1.518
PEMBANTU RUMAH TANGGA	32	73	79	30	117	60	3	554	329	119	1.396
PENATA BUSANA	-	3	5	-	1	1	-	3	6	4	23
PENATA RAMBUT	7	26	18	10	22	10	-	57	64	19	233
PENATA RIAS	5	34	11	6	24	9	-	41	37	16	186
PENDETA	67	278	110	420	177	53	58	168	178	55	1.564
PENELITI	1	8	2	2	7	1	1	4	5	2	33
PENGACARA	10	39	17	11	9	8	1	86	99	10	290
PENSIUNAN	1.349	2.541	961	754	573	450	159	3.842	4.841	876	16.346
PENTERJEMAH	1	-	-	1	-	-	1	3	4	2	12
PENYIAR RADIO	-	-	1	1	3	-	-	1	10	4	20
PERANCANG BUSANA	-	1	2	-	4	1	-	2	4	3	17
PERANGKAT DESA	256	658	103	259	422	99	154	6	4	2	1.963
PERAWAT	343	803	296	366	485	199	138	1.090	1.257	349	5.326
PERDAGANGAN	329	909	943	362	1.234	644	32	423	1.160	1.095	7.131
PETANI/PEKEBUN	23.490	39.529	24.312	20.277	27.277	14.845	8.088	6.159	9.786	1.512	175.117
PETERNAK	25	96	91	31	66	48	1	76	56	28	518
PIALANG	-	1	-	1	2	4	-	1	1	1	11
PILOT	1	-	1	-	1	-	-	4	-	3	10
PSIKIATER/PSIKOLOG	4	5	4	-	2	-	-	6	6	6	33
SENIMAN	5	16	12	9	11	9	-	70	57	27	216
SOPIR	532	1.168	1.052	232	1.278	995	9	3.546	1.455	433	10.700
TABIB	1	1	-	2	6	1	-	1	3	4	19
TENTARA NASIONAL INDONESIA	175	1.485	488	119	193	317	18	3.563	1.223	385	7.966
TRANSPORTASI	23	121	120	69	177	263	10	64	148	96	1.091
TUKANG BATU	76	215	306	77	202	168	-	157	559	252	2.012
TUKANG CUKUR	6	11	18	1	16	13	-	35	30	19	149
TUKANG GIGI	1	6	2	2	2	-	-	3	4	2	22
TUKANG JAHIT	39	126	95	59	80	89	6	324	230	95	1.143
TUKANG KAYU	105	564	531	156	407	345	13	286	436	139	2.982
TUKANG LAS/PANDAI BESI	6	51	53	27	55	32	2	100	109	42	477
TUKANG LISTRIK	4	17	23	8	24	15	-	6	77	31	205
TUKANG SOL SEPATU	2	4	8	1	6	5	-	8	13	5	52
USTADZ/MUBALIGH	31	59	45	11	55	37	2	108	98	58	504
WAKIL BUPATI	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	6
WAKIL GUBERNUR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
WAKIL WALIKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WALIKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WARTAWAN	12	18	31	4	17	15	-	104	78	29	308
WIRASWASTA	35.852	69.014	6.650	12.629	32.207	10.241	2.034	24.270	56.292	9.166	258.355
TOTAL	309.659	806.952	298.999	186.738	448.845	202.061	39.741	757.415	881.216	191.805	4.123.255

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024,
diolah

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan



Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat. Selama ini kelompok penyandang cacat

merasa terdiskriminasi, karena di berbagai tempat umum tidak tersedia jalan khusus untuk pengguna kursi roda, toilet khusus untuk mereka dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus (penyandang cacat).

Tabel III.12
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Penyandang Disabilitas
Provinsi Kalimantan Timur

KABUPATEN/ KOTA	DISABILITAS FISIK			DISABILITAS FISIK DAN MENTAL			DISABILITAS NETRA/BUTA			DISABILITAS MENTAL/JIWA			DISABILITAS RUNGU/WICARA			DISABILITAS LAINNYA		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
PASER	28	33	61	16	15	31	50	33	83	115	61	176	7	7	14	17	16	33
KUKAR	257	194	451	100	82	182	178	157	335	367	204	571	69	148	117	116	95	211
BERAU	25	24	49	9	16	25	44	30	74	168	65	233	10	4	14	24	21	45
KUBAR	53	42	95	22	20	42	67	50	117	109	50	159	11	8	19	61	35	96
KUTIM	53	43	96	27	25	52	50	41	91	122	75	197	8	5	13	51	51	102
PENAJAM PASER UTARA	71	62	133	29	25	54	56	54	110	87	55	142	25	14	39	33	25	58
MAHKAM ULU	41	14	55	3	2	5	20	14	34	21	15	36	6	7	13	15	10	25
BALIKPAPAN	106	57	163	28	16	44	128	85	213	436	151	587	15	8	23	73	53	126
SAMARINDA	63	60	123	43	28	71	104	81	185	487	212	699	15	11	26	39	39	78
BONTANG	58	38	96	11	13	24	49	30	79	195	74	269	6	9	15	46	36	82
TOTAL	755	567	1.252	288	242	530	746	575	1.312	2.107	962	3.069	172	121	293	475	381	856

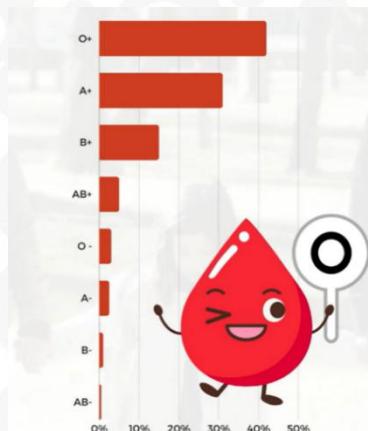
Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

Tabel III.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

NO	GOLONGAN DARAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	%
1	A	91.200	87.071	178.271	4,32
2	A-	214	796	1.010	0,02
3	A+	17.944	17.602	35.546	0,86
4	B	104.433	101.295	205.728	4,99
5	B-	252	956	1.208	0,03
6	B+	16.643	15.722	32.365	0,78
7	AB	33.159	30.127	63.286	1,53
8	AB-	360	490	850	0,02
9	AB+	5.005	4.986	9.991	0,24
10	O	196.609	175.102	371.711	9,01
11	O-	2.146	2.849	4.995	0,12
12	O+	18.922	17.415	36.337	0,88
13	TIDAK TAHU	1.651.778	1.530.227	3.182.005	77,17
TOTAL		2.138.665	1.984.638	4.123.303	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah



Dapat dilihat dari tabel di atas tentang penduduk berdasarkan golongan darah, bahwa jumlah proporsi penduduk Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 77,17 % penduduk Kalimantan Timur masih belum dapat mencantumkan jenis golongan darahnya dalam dokumen kependudukan, hal ini perlu mendapat perhatian bagi petugas registrasi kependudukan, karena golongan darah merupakan hal yang sangat penting, karena penduduk perlu mengetahui jenis golongan darahnya ketika penduduk tersebut ingin memberikan transfusi darah atau sebaliknya.

Terlihat juga bahwa sebagian besar penduduk yang sudah mencantumkan golongan darahnya, namun masih belum mencantumkan rhesusnya positif atau negatif (+/-). Dari jumlah golongan yang tercantum di tabel di atas terlihat bahwa golongan Darah O (O/O+/O-) mempunyai proporsi terbesar yaitu sekitar 10,02% disusul golongan darah B (B/ B+/B-) sebesar 5,80 % dan golongan darah A (A/A+/A-) sebesar 5,21 % dan yang terkecil proporsinya adalah golongan darah AB (AB/AB+/AB-) yaitu sebesar 1,80 %.

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel III.14
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

STATUS KAWIN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
Belum Kawin	1.145.207	55,81	906.675	44,19	2.051.882	49,76
Kawin	924.343	50,23	915.764	49,77	1.840.107	44,63
Cerai Hidup	36.819	43,91	47.031	56,09	83.850	2,03
Cerai Mati	32.296	21,90	115.168	78,10	147.464	3,58
Jumlah	2.138.665	51,85	1.984.638	48,13	4.123.303	100

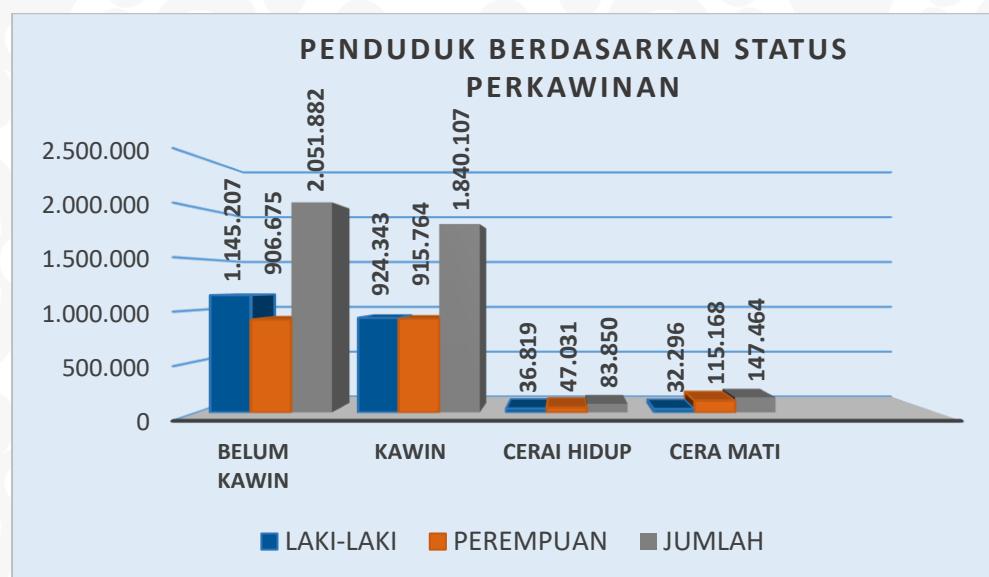
Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah



Informasi tentang komposisi struktur perkawinan penduduk pada waktu dan wilayah tertentu berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Perkawinan pada umur dini akan menimbulkan dampak terhadap kualitas keluarga. Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, status belum kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 49,76% atau 1.145.207 orang dimana proporsi

laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang kedua yaitu kategori kawin sebesar 44,63% dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk cerai mati presentasenya sebesar 3,58% atau sebanyak 147.464 orang. Adapun status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 2,03% atau sebanyak 83.850 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Proporsi ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan mengungat cerai.

Gambar III.5
Grafik Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan



Tabel III.15
Angka Perkawinan Kasar per Kabupaten/Kota

KAB/KOTA	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2024	ANGKA PERKAWINAN KASAR
PASER	142.702	307.291	464,39
KUTAI KARTANEGARA	368.058	793.131	464,06
BERAU	130.925	288.943	453,12
KUTAI BARAT	85.965	182.544	470,93
KUTAI TIMUR	199.762	433.327	461,00
PENAJAM PASER UTARA	91.440	199.600	458,12
MAHKAM ULU	17.097	39.319	434,83
KOTA BALIKPAPAN	328.202	746.804	439,48
KOTA SAMARINDA	393.433	868.499	453,00
KOTA BONTANG	82.523	190.621	432,92
TOTAL	1.840.107	4.050.079	454,34

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Di Indonesia pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan pada tahun 2020 ini telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2020 tentang perkawinan yang dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan, apabila laki-laki dan perempuan yang akan menikah telah mencapai usia minimal 19 tahun. Dalam melakukan sebuah perkawinan, usia merupakan salah satu pembeda antara Undang-Undang lama dengan Undang-Undang yang baru. Undang-Undang lama digunakan untuk mengatur usia nikah pada perempuan dengan minimal usia 16 tahun, sedangkan pada Undang-Undang baru minimal usia untuk menikah pada laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang mengikat satu sama lain, yang telah disahkan oleh hukum antara dua orang dewasa tanpa adanya paksaan.

Dengan dinaikannya batas usia perkawinan bagi perempuan, selain tidak diskriminasi juga untuk menekan laju kelahiran penduduk dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun di suatu periode tertentu. Untuk Provinsi Kalimantan Timur angka perkawinan kasarnya adalah 454,34 artinya dari 1000 penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 459-460 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk status kawin tanpa memperdulikan urutan perkawinan dan umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang usianya sudah pantas maupun yang belum.

Tabel III.16
Angka Perkawinan Umum per Kabupaten/Kota

KAB/KOTA	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK > 15 TAHUN TENGAH 2024	ANGKA PERKAWINAN UMUM
PASER	142.702	227.084	628,41
KUTAI KARTANEGARA	368.058	586.058	628,02
BERAU	130.925	210.973	620,58
KUTAI BARAT	85.965	138.053	622,70
KUTAI TIMUR	199.762	314.811	634,55
PENAJAM PASER UTARA	91.440	148.278	616,68
MAHKAM ULU	17.097	29.959	570,68
KOTA BALIKPAPAN	328.202	560.421	585,63
KOTA SAMARINDA	393.433	655.787	599,94
KOTA BONTANG	82.523	141.922	581,47
TOTAL	1.840.107	3.013.346	610,65

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Sama halnya dengan angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembaginya adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya tidak berisiko kawin.

Untuk Provinsi Kalimantan Timur, angka perkawinan umum sebesar 610,65 yang artinya dari 1000 penduduk 610,65 penduduk usia diatas 15 tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan.

Tabel III.17
Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK 2023	ANGKA PERKAWINAN	(%)
15-19	347.513	2.617	0,753
20-24	371,210	63.794	17,185
25-29	340,743	178.721	52,450
30-34	321,099	244.792	76,236
35-39	316,933	266.380	84,049
40-44	328,373	283.463	86,323
45-49	286,894	246.924	86,068
50-54	237,705	200.384	84,299
55-59	186,490	149.758	80,304
TOTAL	2.736.960	1.636.833	59,805

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Angka perkawinan spesifik merupakan angka perkawinan berdasarkan umur yaitu menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur. Berdasarkan tabel diatas angka perkawinan spesifik tahun 2023 pada kelompok umur 20-24 tahun, adalah 187,42 artinya dari 1.000 penduduk usia 20-24 tahun, terdapat 187 penduduk yang melakukan perkawinan. Kelompok umur yang melakukan perkawinan terbanyak ada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu mencapai 868,23 penduduk artinya terdapat 868 penduduk dari 1.000 penduduk pada usia 40-44 melakukan perkawinan.

Sedangkan kelompok umur terendah yang berstatus kawin ada pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 10,15 artinya dari 1.000 orang di usia 15-19 tahun yang berstatus kawin berjumlah 10 orang karena masih dibawah umur untuk usia menikah, dan kelompok umur usia ≥ 75 tahun yaitu sebesar 481,99 ini menandakan bahwa semakin tua usia penduduk maka semakin jarang melakukan suatu perkawinan.

Tabel III.18
Angka Perceraian Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK 2024	CERAI HIDUP	%	CERAI MATI	%	JUMLAH	%
15-19	347.513	25	0,01	6	0,00	31	0,01
20-24	371.210	1.435	0,39	107	0,03	1.542	0,42
25-29	340.743	5.918	1,74	550	0,16	6.468	1,90
30-34	321.099	10.248	3,19	1.542	0,48	11.790	3,67
35-39	316.933	12.622	3,98	3.283	1,04	15.905	5,02
40-44	328.373	14.654	4,46	6.673	2,03	21.327	6,49
45-49	286.894	13.081	4,56	11.400	3,97	24.481	8,53
50-54	237.705	10.067	4,24	17.209	7,24	27.276	11,47
55-59	186.490	7.050	3,78	23.425	12,56	30.475	16,34
TOTAL	2.736.960	78.028	2,58	138.959	5,08	216.987	7,93

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Angka perceraian menurut kelompok umur menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai status cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan untuk suatu tahun tertentu. Adanya perceraian dapat mengurangi fertilitas. Bila angka perceraian tinggi maka akan menjadi perhatian pemerintah, karena akan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Adanya rencana pemerintah untuk memberikan kursus kelas pranikah, diharapkan akan menekan angka perceraian yang terjadi karena meningkatnya pemahaman calon pengantin dalam pernikahan. Angka perceraian sendiri memiliki persentase sebesar 7,93% pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk angka perceraian hidup sendiri yang memiliki persentase tertinggi berada di kelompok umur 45-49 tahun dengan angka 4,56%, sedangkan angka peceraian terendah berada di kelompok umur 15-19 tahun dengan angka 0,01% pada tahun 2024.

7. Keluarga.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga



Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dapat terbentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Tabel III.19
Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	%	JUMLAH KELUARGA	%	RATA
PASER	309.667	7,51	101.133	7,30	3,1
KUTAI KARTANEGARA	806.964	19,57	265.917	19,18	3
BERAU	299.005	7,25	103.888	7,49	2,9
KUTAI BARAT	186.581	4,53	63.334	4,57	2,9
KUTAI TIMUR	448.850	10,89	155.888	11,25	2,9
PENAJAM PASER UTARA	202.067	4,90	66.756	4,82	3
MAHKAM ULU	39.715	0,96	13.599	0,98	2,9
KOTA BALIKPAPAN	757.418	18,37	259.965	18,75	2,9
KOTA SAMARINDA	881.225	21,37	292.721	21,12	3
KOTA BONTANG	191.811	4,65	63.021	4,55	3
JUMLAH	4.123.303	100	1.386.222	100	3

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Jumlah keluarga yang berada di Provinsi Kalimantan Timur ada sebanyak 4.123.303 keluarga yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, memiliki 105 Kecamatan dan 1.038 Desa/Kelurahan. Jika dilihat dari tabel di atas, Kota Samarinda memiliki jumlah Keluarga yang terbesar (21,12%) disusul dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (19,18%). Sedangkan jumlah keluarga terkecil ada di Kabupaten Mahakam Ulu (0,98%) disusul dengan Kota Bontang dengan persentase (4,55%).

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kalimantan Timur sebanyak 3 orang per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Kalimantan Timur lebih banyak yang merupakan keluarga inti. Salah satu penggunaan informasi ini yaitu dapat digunakan untuk menyusun rencana pembangunan perumahan, misalnya untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

b. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.

Tabel III.20
Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

STATUS HUB KELUARGA	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	L + P	%
KEPALA KELUARGA	1.125.240	52,61	260.982	13,15	1.338.194	33,62
SUAMI	18	0	0	0	16	0
ISTERI	0	0	853.770	43,02	841.846	20,71
ANAK	976.018	45,64	833.342	41,99	1.755.757	43,88
MENANTU	20	0	25	0	43	0
CUCU	6.950	0,32	5.741	0,29	11.894	0,31
ORANG TUA	465	0,02	3.931	0,20	4.608	0,11
MERTUA	338	0,02	2.889	0,15	3.409	0,08
FAMILI LAIN	27.597	1,29	21.979	1,11	48.424	1,20
PEMBANTU	10	0	41	0	65	0
LAINNYA	2.009	0,09	1.938	0,10	3.480	0,10
TOTAL	2.138.665	51,87	1.984.638	48,13	4.123.303	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan anggota keluarga menurut status hubungan dengan kepala keluarga. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 1.125.240 kepala keluarga laki-laki yang memiliki isteri sebanyak 841.846 orang. Sedangkan dari 260.982 kepala keluarga perempuan hanya 18 orang saja yang bersuami (0,00%). Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang, baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai. Penduduk perempuan yang berstatus kepala keluarga, perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan tingkat kesejahteraannya lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 1,20%. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Provinsi Kalimantan Timur jumlahnya tidak besar. Namun demikian dari segi jumlah angka yang dihasilkan cukup besar (4 jiwa).

c. Karakteristik Kepala Keluarga

Infomasi tentang karakteristik kepala keluarga merupakan informasi yang penting, terutama dalam program untuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Tabel dibawah menunjukkan jumlah dan proporsi kepala keluarga menurut status kawin. Umumnya kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Timur yang berstatus kawin memiliki presentase sebesar 70,70%. Proporsi kepala keluarga laki-laki berstatus kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga perempuan, yaitu masing-masing 82% dan 22,02%.

Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 13,23%. Proporsi kepala keluarga perempuan yang belum kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga laki-laki yaitu 11,96% (laki-laki), dan 13,23% (perempuan). Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang mengantikan orang tua yang sudah meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Tabel III.21
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
Belum Kawin	134.634	11,96	48.760	18,70	183.394	13,23
Kawin	922.709	82,00	57.416	22,02	980.125	70,70
Cerai Hidup	36.173	3,21	45.368	17,40	81.811	5,90
Cerai mati	31.724	2,82	109.168	41,87	140.892	10,16
Jumlah	1.125.240	81,2	260.712	18,8	1.385.952	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Jika diperhatikan lebih lanjut, persentase kepala keluarga yang berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 16,07%, dimana proporsi kepala keluarga perempuan berstatus cerai mati jauh lebih tinggi (41,87%) dibandingkan cerai hidup (17,40%). Umumnya laki-laki pada saat setelah terjadi perceraian mereka akan segera melakukan perkawinan kembali, sementara pada perempuan lebih banyak yang menunda perkawinan dengan berbagai alasan yang belum diketahui.

Tabel III.22
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur

KEL. UMUR	KK (LAKI-LAKI)	%	KK (PEREMPUAN)	%	JUMLAH KK	%
15-19	6.096	0,54	3.769	1,44	9.865	0,71
20-24	52.312	4,65	16.224	6,22	68.536	4,94
25-29	106.620	9,48	18.847	7,22	125.467	9,05
30-34	136.415	12,12	17.409	6,67	153.824	11,10
35-39	147.078	13,07	18.680	7,16	165.758	11,96
40-44	159.329	14,16	23.383	8,96	182.712	13,18
45-49	144.168	12,81	26.101	10,00	170.269	12,28
50-54	121.618	10,81	27.713	10,62	149.331	10,77
55-59	96.028	8,53	29.780	11,41	125.808	9,08
60-64	66.828	5,94	27.327	10,47	94.155	6,79
65-69	43.313	3,85	21.840	8,37	65.153	4,70
70-74	26.468	2,35	14.599	5,60	41.067	2,96
>=75	18.916	1,68	15.255	5,85	34.171	2,47
JUMLAH	1.125.189	100	260.927	100	1.386.116	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Dari tabel diatas nampak bahwa sebagian besar keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dikepalai oleh Kepala Keluarga kelompok umur 40-44 tahun yaitu 182.712 jiwa. Berarti hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berada pada kelompok yang produktif, dengan rata-rata telah masuk ke pasar kerja. Kelompok produktif ini juga sekaligus berpasangan dengan kelompok reproduktif, sehingga perlunya dirancang program yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga dan juga kesejahteraan keluarga, yang termasuk dengan peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana.

Adapun jumlah kepala keluarga pada kelompok umur 15-19 tahun merupakan paling kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya yaitu 0,71% atau 9.865 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut penduduk yang bisa dikatakan belum cukup dewasa perlu mendapatkan perhatian karena pada usia tersebut menjadi kepala keluarga merupakan tanggungan beban yang sangat besar, berdasarkan ukuran usia, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai, semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula kesejahteraan dari orang yang bersangkutan maupun anggota keluarganya.

Tabel III.23
Jumlah KK Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	L + P	%
Tidak/Belum Sekolah	24.699	2,19	14.528	5,57	39.227	2,83
Belum Tamat SD/Sederajat	59.093	5,25	24.772	9,49	83.865	6,05
Tamat SD/Sederajat	243.211	21,61	85.471	32,75	328.682	23,71
SLTP/Sederajat	188.854	16,78	43.659	16,73	232.513	16,77
SLTA/Sederajat	474.675	42,18	69.264	26,54	543.939	39,24
Diploma I/II	5.340	0,47	1.345	0,52	6.685	0,48
Akademi/Diploma III/S. Muda	25.620	2,28	5.019	1,92	30.639	2,21
Diploma IV/Strata I	95.522	8,49	15.798	6,05	111.320	8,03
Strata II	7.748	0,69	1.064	0,41	8.812	0,64
Strata III	478	0,04	62	0,02	540	0,04
JUMLAH	1.125.240	100	260.982	100	1.386.222	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Tabel diatas menyajikan jumlah dan persentase KK menurut pendidikan yang ditamatkan. Dari tabel tersebut tampak bahwa 32,59% KK berpendidikan tidak/belum sekolah, belum tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat, jumlah itu sangatlah besar yang artinya hampir setengah kepala keluarga di Provinsi Kalimantan Timur pendidikannya SD kebawah.

Proporsi kepala keluarga yang tidak/belum sekolah terbesar ada pada kepala keluarga perempuan dengan persentase sebesar (5,57%).

Pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, proporsi kepala keluarga perempuan yang menamatkan sekolah menengah dan pendidikan tinggi lebih kecil yaitu sebesar (52,19%) dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki dengan persentase (70,94%). Tingkat pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan keluarga. Karena semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga, diharapkan akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dari orang yang bersangkutan maupun anggota keluarganya.

Selain itu pendidikan kepala keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan pendidikan anggota keluarganya. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan rendah dibanding umumnya, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Berkaitan dengan tingginya proporsi kepala keluarga perempuan yang tamat SD/sederajat, belum tamat SD/sederajat, dan tidak sekolah maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan. Hal ini dibuktikan dengan jenis kegiatan yang dimiliki oleh kepala keluarga sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah atau pada halaman selanjutnya.

Tabel III.24
Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	L + P	%
BELUM TIDAK BEKERJA	69.423	6,17	21.476	8,23	90.899	6,56
MENGURUS RUMAH TANGGA	63	0,01	161.128	61,74	161.191	11,63
PELAJAR/MAHASISWA	38.417	3,41	16.523	6,33	54.940	3,96
PENSIUNAN	12.325	1,10	2.012	0,77	14.337	1,03
BEKERJA	1.005.012	89,32	59.843	22,93	1.064.855	76,82
JUMLAH	1.125.240	81,17	260.982	18,83	1.386.222	100

Sumber: Dinas Kependudukan, PP dan PA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa 76,82% Kepala Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur itu bekerja. Proporsi ini lebih tinggi ada pada Kepala Keluarga laki-laki yaitu 89,32% dari total keluarga laki-laki yang bekerja, dibandingkan dengan Kepala Keluarga perempuan yang hanya memiliki persentase 22,93% dari total Kepala Keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan itu masih terbatas.

Jika dilihat pada tabel diatas, menunjukkan bahwa hanya sedikit kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga dengan persentase 0,01% dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan dengan persentase 61,74%. Selain itu juga terdapat kepala keluarga

yang sudah pensiun 1,03% dengan Proporsi kepala keluarga perempuan lebih rendah 0,77% daripada laki-laki 1,10%. Yang perlu menjadi perhatian lebih adalah banyak keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja sebanyak 6,56%.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsinya menurut persentase kecil (6,56%) akan tetapi kalau dilihat dari segi jumlah sangatlah besar (90.899 jiwa).

Kepala keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan oleh usia mereka yang telah memasuki usia pensiun ataupun memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Mereka perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan keluarga mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah dan diduga mereka tidak mempunyai penghasilan, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

3.2 KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk dapat diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Dalam proses pembangunan manusia dalam suatu wilayah penggunaan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan dasar pengukuran keberhasilan yang utama. IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar yang terdiri dari tingkat pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 78,79 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 78,20. Peningkatan terjadi pada semua komponen penyusun IPM, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Selama 2020–2024, IPM Kalimantan Timur rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun.

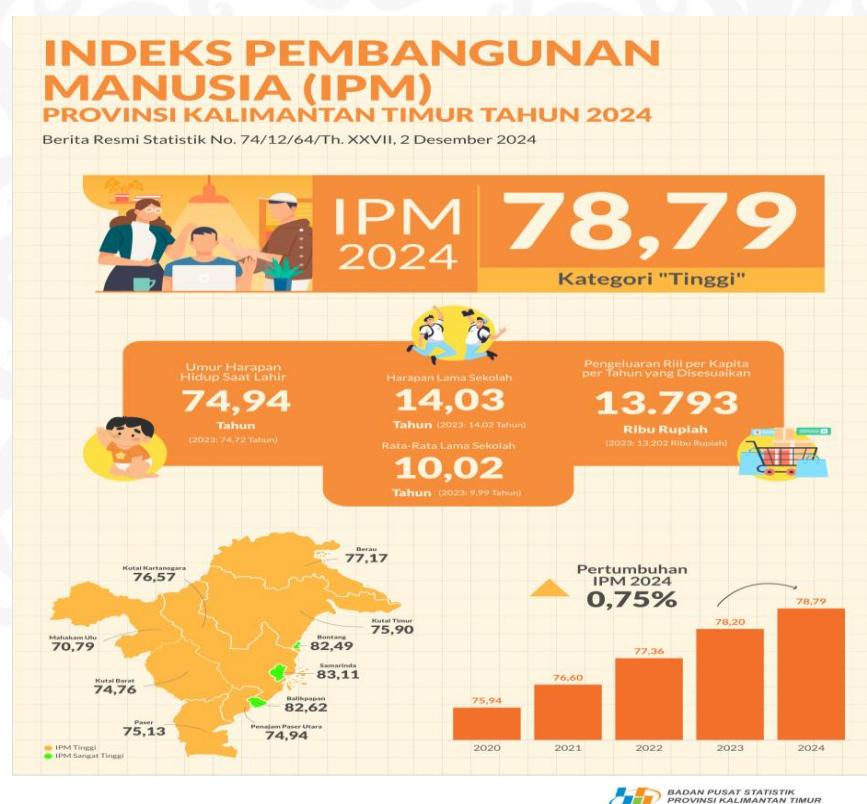
Peningkatan terjadi pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,94 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Berikutnya, pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,02 menjadi 14,03 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,03 tahun, dari 9,99 tahun menjadi 10,02 tahun pada tahun 2024. Selain itu peningkatan juga terjadi komponen pengeluaran ril per kapita yang disesuaikan (harga

konstan 2012) sebesar 13,79 juta Rupiah, meningkat 591 ribu rupiah (4,48 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi di Pulau Kalimantan, dari lima Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, keseluruhan berstatus tinggi yaitu nilai berada diatas 70. Pada penilaian nasional Kalimantan Timur menduduki peringkat ke-4 secara nasional dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, setelah DKI Jakarta (peringkat 1), DI Yogyakarta (peringkat 2) dan Kepulauan Riau (peringkat 3).

Sejalan dengan capaian di tingkat provinsi, pembangunan manusia di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, baik angka IPM maupun komponen penyusunnya. Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat merupakan kabupaten dengan kenaikan IPM yang tertinggi, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 1,10 persen dan 1,07 persen dari tahun 2023.

Gambar III.6
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024



Sumber : Data BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

3.2.1 Kesehatan

1. Kelahiran (Fertilitas)



kesempatan kerja.

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan

a. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)

Angka Kelahiran Kasar (*CBR*) menunjukkan banyaknya kelahiran disuatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka Kelahiran kasar (*CBR*) berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi disuatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

b. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio anak dan perempuan ini digunakan untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk. Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia subur (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu. Dalam bentuk rumus, rasio anak dan perempuan dinyatakan sebagai berikut:

$$1. \quad CWR = P(0 - 4) / Pf(15 - 49) \times K$$

Keterangan

CWR = Rasio Anak Perempuan (Child Women Ratio)

P (0 – 4) = Jumlah Penduduk umur dibawah 5 tahun

Pf (15 – 49) tahun = Jumlah Penduduk Perempuan usia 15 – 49 tahun

K = Konstanta (nilainya 100)

Tabel III.25
Rasio Anak dan Perempuan (CWR) Penduduk Kalimantan Timur
Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	00-04 (JML)	15-49 (PR)	CWR (%)
1	KAB. PASER	23.910	173.321	13,80
2	KAB. KUTAI KARTANEGARA	60.297	450.028	13,40
3	KAB. BERAU	23.458	171.359	13,69
4	KAB. KUTAI BARAT	12.492	104.896	11,91
5	KAB. KUTAI TIMUR	35.146	259.151	13,56
6	KAB. PENAJAM PASER UTARA	15.622	110.473	14,14
7	KAB. MAHKAM ULU	2.818	22.421	12,57
8	KOTA BALIKPAPAN	55.922	421.650	13,26
9	KOTA SAMARINDA	30.206	490.505	6,16
10	KOTA BONTANG	12.899	108.961	13,67
TOTAL		306.984	2.312.765	13,27

Sumber : Diolah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun, 2025

Berdasarkan tabel diatas Rasio Anak Perempuan tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur adalah 13,27%. Presentase Rasio Anak Perempuan tertinggi berada di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu 13,80% disusul oleh Kabupaten Paser yaitu 13,67% dan Kota Bontang yaitu 14,29%. Sementara Presentase Rasio Anak Perempuan terendah berada di Kota Samarinda yaitu 6,16%.

2. Kematian (Mortalitas)



Kematian atau *mortalitas* adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat

kesehatan penduduk di daerah tersebut. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun dan didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup. Angka Kelahiran Bayi/IMR digunakan sebagai indikator yang menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tabel III.26
Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	37	60	67	65	62
2	Kutai Barat	38	30	42	26	24
3	Kutai Kartanegara	133	241	179	144	141
4	Kutai Timur	42	26	44	79	68
5	Berau	96	124	86	55	77
6	Penajam Paser Utara	27	22	40	31	23
7	Mahakam Ulu	9	9	17	6	6
8	Balikpapan	75	92	72	83	82
9	Samarinda	26	47	54	83	65
10	Bontang	44	49	37	30	39
	Alamat Domisili Ditolak Kab/kota (angka provinsi)					2
	Kalimantan Timur	527	700	638	602	589

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah kematian bayi (0–11) bulan mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 527 bayi yang meninggal menjadi 589 bayi di tahun 2024. Penyebab tertinggi dari Kematian Bayi ini disebabkan oleh karena *Respiratory and Cardiovascular Disorders* dan *Low Birth Weight and Prematurity*.

b. Angka Kematian Bayi Baru Lahir/Neonatal

Kematian *neonatal* atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

c. Angka Kematian Anak/Balita

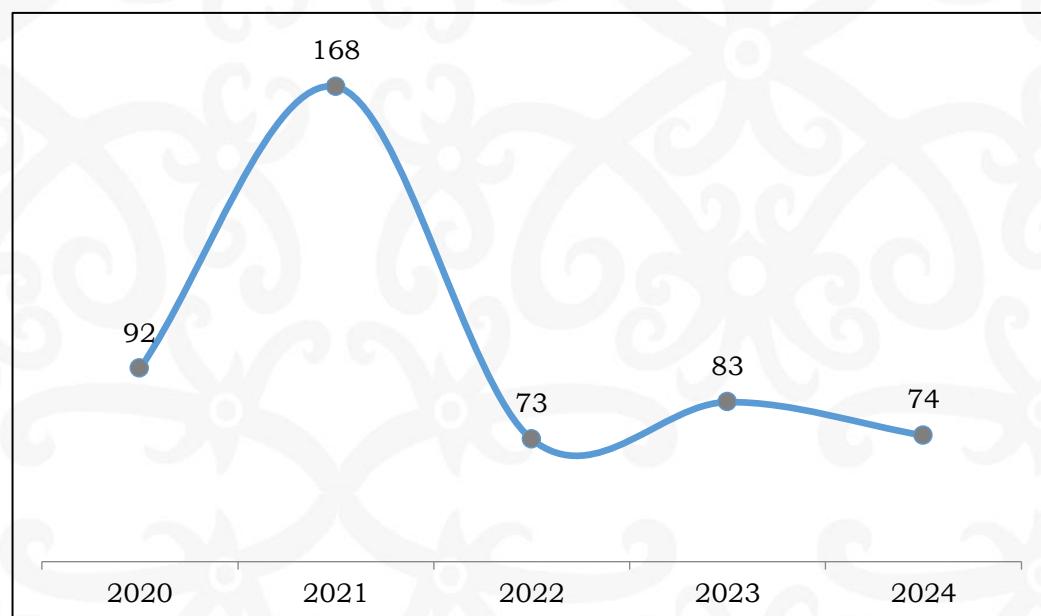
Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan menjelang 5 tahun. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak seperti tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular anak atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau disekitar rumah.

d. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahirannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain. Informasi ini berguna untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Kematian Ibu masih menjadi tantangan utama di sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil long form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Timur, Angka Kematian Ibu mencapai 177 kematian per 100.000 kelahiran.

Gambar III.7
Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Prov Kaltim, 2025

Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2020–2024 berfluktuasi, cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 mencapai 74 jiwa. Jumlah kematian ibu tertinggi tahun 2024 berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.

Tabel III.27
**Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Jiwa)**

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	5	20	5	12	7
2	KUBAR	5	9	5	6	5
3	KUKAR	28	38	24	14	14
4	KUTIM	14	13	5	13	10
5	Berau	7	16	8	5	9
6	PPU	3	15	5	5	6
7	MAHULU	4	2	0	0	0
8	Balikpapan	12	18	4	8	9
9	Samarinda	10	21	13	19	10
10	Bontang	4	16	4	1	3
	Alamat Domisili Ditolak Kab/kota (angka provinsi)					1
	Kalimantan Timur	92	168	73	83	74

Sumber : Dinas Kesehatan Prov Kaltim, 2025

3.2.2 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk umur 10 tahun keatas atau 15 tahun keatas yang bisa dan menulis serta mengerti kalimat sederhana. Kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dan berbagai media. Hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Samaakin tinggi nilai indikator AMH maka semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia di suatu daerah.

Angka Melek Huruf mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Menurut BPS, terjadi sedikit penurunan pada angka melek huruf pada penduduk laki-laki maupun perempuan berumur 15 tahun ke atas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel III.28
**Angka Melek Huruf di Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2022 – 2024**

Provinsi	2022	2023	2024
Kalimantan Timur	98,97	99,01	98,96

Sumber : BPS Prov. Kaltim, 2024

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sampai dengan 2024 selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat cukup tinggi terkait pentingnya pendidikan dan keberhasilan program pemerintah dalam memberantas buta aksara terutama di daerah pedesaan dimana masih banyak ditemukan penduduk yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) / Angka Partisipasi Murni (APM)

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan.

Tabel III.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 – 2024

SD/MI/Paket A				SMP/Mts/Paket B				SMA/SMK/MA/Paket C			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
105,26	105,21	106,46	105,31	92,03	91,47	92,28	91,72	95,52	95,09	95,16	98,75

Sumber : Data BPS Prov. Kaltim, 2024

Berdasarkan tabel diatas, angka partisipasi kasar di Provinsi Kalimantan Timur pada tingkat SD/sederajat dan SMP/sederajat mengalami penurunan sedangkan pada tingkat SMA/sederajat mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dan jumlah penduduk diusia yang sama. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Tabel III.30
Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 – 2024

SD/MI/Paket A				SMP/Mts/Paket B				SM/SMK/MA/Paket C			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
98,36	98,45	98,53	98,59	81,30	82,65	83,36	83,70	69,29	69,10	69,89	72,37

Sumber : BPS Prov. Kaltim, 2024

Berdasarkan tabel diatas, angka partisipasi murni di Provinsi Kalimantan Timur pada tingkat SD/sederajat dan SMP/sederajat dan SMA/sederajat mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

c. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) murid menyajikan persentase murid putus sekolah menurut kelompok umur 7-18 tahun. Angka putus sekolah di Kalimantan Timur dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kondisi tersebut terjadi di seluruh kelompok usia.

Gambar III.8
Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kaltim, 2024

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.

3.2.3 Sosial

Penduduk Miskin



Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi,

angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 833.955 rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.

Tabel III.31
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2020-2024

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31
Maret 2023	560.368	229.818	790.186	231,07	6,11
Maret 2024	590.571	243.384	833.955	221,34	5,78

Sumber : BPS Kaltim, 2024

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 4,47 persen, turun 0,21 poin persen dari Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 8,76 persen, turun 0,52 poin persen dari Maret 2023.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp833.955,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp590.571,- (70,82 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp243.384,- (29,18 persen).

Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5,13 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp4.278.189,-/ rumah tangga miskin/bulan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya terbatas pada dimensi jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, terdapat juga dimensi lain yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023 – Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,799 , naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,771. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,140 menjadi 0,154.

Tabel III.32
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
(Ribu/Jiwa) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2024

KABUPATEN/KOTA	2022	2023	2024
Kab. Paser	27,02	26,39	25,28
Kab. Kutai Barat	15,38	14,69	14,49
Kab. Kutai Kartanegara	62,87	60,86	59
Kab. Kutai Timur	36,84	37,04	37,11
Kab. Berau	13,31	13,26	12,35
Kab. Penajam Paser Utara	11,59	11,19	10,78
Kab. Mahakam Ulu	3,10	3,06	2,9
Kota Balikpapan	15,83	14,99	14,53
Kota Samarinda	41,95	41,89	37,8
Kota Bontang	8,39	7,71	7,11
Prov. Kalimantan Timur	236,25	231,08	221,34

Sumber : BPS Prov. Kaltim, 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan akan tetapi berdasarkan kabupaten/kota terdapat kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2024 yaitu sebanyak 37,11 ribu jiwa dari 37,04 ribu jiwa pada tahun 2023.

Jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 59 ribu jiwa kemudian disusul oleh Kota Samarinda yaitu 37,8 ribu jiwa dan Kabupaten Kutai Timur yaitu 37,11 ribu jiwa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantara jumlah wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduk yang banyak sehingga lowongan kerja terbatas dan penduduk banyak yang menjadi pengangguran. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada pada Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 2,9 ribu jiwa dan disusul oleh Kota Bontang yaitu 7,11 ribu jiwa. Ini disebabkan oleh luas wilayah kedua daerah tersebut yang cukup kecil dan banyaknya lapangan pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang kecil dan jumlah lapangan pekerjaan yang cukup maka angka pengangguran pada daerah tersebut dapat berkurang dan jumlah kemiskinan pun dapat berkurang.

3.2.4 Mobilitas.

1. Pengertian



Mobilitas penduduk atau gerakan penduduk ialah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk selama ini belum memperoleh perhatian dari pemerintah. Padahal mobilitas penduduk mempunyai

peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan. Di Indonesia ketika laju pertumbuhan penduduk alamiah

sudah bisa diturunkan dengan pengendalian kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk mulai memperoleh perhatian. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai masalah yang akhir-akhir ini terjadi seperti terorisme, konflik sosial, konflik antar suku yang semua disebabkan oleh mobilitas penduduk yang semakin meningkat.

2. Jenis-jenis Mobilitas Penduduk

Ada dua macam mobilitas penduduk, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Migrasi*, yaitu mobilitas penduduk yang bertujuan untuk menetap di daerah baru.
- 2) *Mobilitas sirkuler (mobilitas sementara)*, yaitu mobilitas penduduk untuk sementara waktu, tidak untuk menetap. Contohnya, setelah panen dan tidak ada kegiatan, para petani pergi ke kota untuk mencari nafkah (migrasi musiman); atau para pekerja yang pada waktu pagi pergi ke kota, sorenya kembali ke tempat tinggalnya di pinggiran kota.

3. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain di dalam negeri maupun dari suatu negara ke negara lain untuk menetap, baik secara perorangan, keluarga maupun berkelompok. Pengertian menetap menurut Sensus Penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal di daerah baru selama enam bulan atau lebih.

4. Sebab-Sebab Terjadinya Migrasi

Ada beberapa sebab terjadinya migrasi, yaitu sebagai berikut:

- a) *Alasan ekonomi*, karena kesukaran hidup di suatu daerah mendorong keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik ke daerah lain.
- b) *Alasan politis*, yaitu adanya pergolakan politik dalam suatu Negara sehingga kaum politisi pindah ke negara lain untuk mencari perlindungan dan keamanan dirinya.
- c) *Alasan agama*, karena kurang terjamin atau terkekang dalam kehidupan beragama penduduk pindah ke daerah lain yang sesuai dengan kehidupan agamanya.
- d) *Alasan lain*, misalnya bencana alam, kekeringan yang panjang, peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit.

5. Jenis-Jenis Migrasi

Ada 2 jenis migrasi, yaitu sebagai berikut.

- a. *Migrasi antarnegara (internasional)*, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang termasuk migrasi antarnegara adalah sebagai berikut :
 - ✓ *Imigrasi*, yaitu masuknya penduduk negara lain ke satu negara. Misalnya, masuknya orang Malaysia ke Indonesia. Orang Malaysia tersebut disebut sebagai *imigran*. Perpindahannya itu disebut imigrasi. Imigrasi dapat bersifat permanen, artinya tinggal menetap untuk selamanya. Sebaliknya, dapat pula bersifat

sementara, misalnya TKI ke Arab Saudi berdasarkan kontrak selama dua tahun.

- ✓ *Emigrasi*, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke Negara lain. Misalnya, orang-orang Indonesia yang pindah ke New Caledonia dan Suriname. Mereka disebut emigran. Perpindahannya disebut emigrasi.
- ✓ *Remigrasi*, yaitu kembalinya para emigran ke negara asalnya. Misalnya, orang-orang Ambon yang tadinya pindah ke Belanda sebagai emigran, kemudian kembali lagi pindah ke Indonesia.
- b. *Migrasi dalam negeri (nasional)*, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain di wilayah negara itu. Misalnya, perpindahan penduduk antarprovinsi. Yang termasuk imigrasi dalam negeri adalah sebagai berikut :
- c. *Transmigrasi (migrasi intern)*, yaitu perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang berpenduduk padat ke suatu pulau atau provinsi lain yang berpenduduk jarang di negara sendiri. Macam-macam transmigrasi adalah sebagai berikut.
 - ⇒ *Transmigrasi umum*, yaitu transmigrasi yang semua biayanya ditanggung pemerintah, baik biaya perjalanan maupun biaya hidup selama satu tahun di daerah transmigrasi. Tiap keluarga mendapat alat pertanian, rumah, bibit, dan tanah seluas dua hektar.
 - ⇒ *Transmigrasi swakarsa*, yaitu transmigrasi yang pemberiannya sebagian ditanggung sendiri dan sebagian ditanggung pemerintah. Pemerintah memberi tanah dua hektar dan membiayai perjalannya.
 - ⇒ *Transmigrasi spontan*, yaitu transmigrasi yang seluruh biaya ditanggung oleh transmigran itu sendiri. Pemerintah tidak memberikan bantuan apa pun
 - ⇒ *Transmigrasi bedol desa*, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa beserta pejabat pemerintah desa. Transmigrasi bedol desa dilaksanakan karena bencana alam, misalnya karena letusan Gunung Merapi, penduduk beserta pejabat desa yang bertempat tinggal di kaki gunung dipindahkan ke Sumatera. Penduduk Wonogiri dipindahkan ke Sitiung (Sumatera Barat), karena daerahnya dibuat PLTA Gajah Mungkur (bendungan).
 - ⇒ *Transmigrasi khusus*, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi bersama instansi pemerintah atau organisasi lain, misalnya KNPI, Pramuka, dan sebagainya. Penyelenggarannya sama dengan transmigrasi umum, misalnya transmigrasi pemuda ke Sumatera Utara (daerah Labuhanbatu).
 - ⇒ *Transmigrasi bekas pejuang*, yaitu transmigrasi yang diselenggarakan oleh bekas pejuang dan yang ditransmigrasikan adalah mantan ABRI yang sudah pensiun. Daerah transmigrasinya adalah Kalimantan Barat, dan Lampung.

d. *Urbanisasi*, ialah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota-kota besar. Permasalahan yang berkaitan dengan urbanisasi adalah sebagai berikut :

- Keadaan di desa, Banyak penduduk tidak memiliki tanah, pendapatan penduduk rendah, dan sulit mencari pekerjaan di luar bidang pertanian.
- Keadaan di kota, Banyak daya tarik di kota, misalnya hiburan, rekreasi, adanya gedung-gedung, fasilitas pendidikan lengkap, dan luasnya kesempatan kerja di desa.
- Akibat urbanisasi, Kekurangan tenaga kerja di desa. Akibatnya, sulit mencari tenaga yang berpendidikan di desa dan sulit mencari tenaga penggerak pembangunan di desa.
- Akibat urbanisasi di kota, Timbul pengangguran karena tidak semua yang urbanisasi dapat bekerja; timbul tuna wisma, dan daerah slum (kumuh); meningkatnya kejahatan; dan angkutan umum tidak dapat mencukupi kebutuhan penumpang yang terus meningkat.
- Usaha pemerintah mengurangi urbanisasi, Pemerintah membatasi penduduk desa pindah ke kota; melaksanakan pembangunan sampai ke daerah-daerah; mengembangkan kota-kota kecil; serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan penduduk desa, misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, rekreasi, dan penerangan.

6. Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar

Berikut disampaikan tabel data migrasi masuk dan migrasi keluar menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tabel III.33

Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK 2024	MIGRASI MASUK			MIGRASI KELUAR			MIGRASI NETO
			LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	PASER	309.667	3.399	3.072	6.471	3.093	2.775	5.868	1,95
2	KUTAI KARTANEGARA	806.964	10.995	9.135	20.130	9.056	7.968	17.024	3,85
3	BERAU	299.005	7.821	5.786	13.607	4.658	3.438	8.096	18,43
4	KUTAI BARAT	186.581	2.424	2.011	4.435	1.339	1.197	2.536	10,18
5	KUTAI TIMUR	448.850	13.182	10.046	23.228	7.485	5.671	13.156	22,44
6	PENAJAM PASER UTARA	202.067	3.108	2.697	5.805	2.076	1.822	3.898	9,44
7	MAHKAM ULU	39.715	685	511	1.196	571	501	1.072	3,12
8	KOTA BALIKPAPAN	757.418	10.186	8.723	18.909	8.165	6.691	14.856	5,35
9	KOTA SAMARINDA	881.225	10.794	10.107	20.901	9.487	8.604	18.091	3,19
10	KOTA BONTANG	191.811	3.295	2.756	6.051	3.215	2.626	5.841	1,09
JML KALIMANTAN TIMUR		4.123.303	65.889	54.844	120.733	49.145	41.293	90.438	7,35

Sumber: Data PDAK KEMENDAGRI RI

Angka Migrasi Netto (Net Migration) yaitu selisih antara migrasi masuk dan keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif. Angka migrasi netto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dengan migran keluar per 1000 penduduk daerah tersebut.

Rumus :

$$MN = \frac{\text{Banyaknya migrasi masuk} - \text{Banyaknya migrasi keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

$$MN = \frac{120.733 - 90.438}{4.123.303} \times 1.000$$

$$MN = 7,35$$

Angka Migrasi Netto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah 7,35. Hal ini berarti selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar dari 1000 penduduk Tahun 2024 adalah 7 jiwa. Migrasi Netto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah Migrasi Netto Positif, Jadi Migrasi Netto Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah Migrasi Netto Positif sebanyak 7 jiwa.

Migrasi neto positif terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur sebesar 22 jiwa sedangkan migrasi positif terkecil ada di Kota Bontang sebesar 1 jiwa. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah migrasi keluar 90.438 jiwa, lebih kecil daripada jumlah migrasi masuk yaitu 120.733 jiwa. Hal ini berarti banyak penduduk dari luar daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin mengadu nasib di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum dan sebagainya. Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi layanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat stelsel aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah kota tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database sesuai dengan dokumen dan realitas yang dialami penduduk.

4.1.1 Kepemilikan Dokumen Kependudukan

1. Kartu Keluarga



Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekeluargaan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang sah dan mempunyai kedudukan hukum keluarga tersebut bertempat tinggal. Pada tahun 2024 ini penandatanganan Kartu Keluarga dan Akta-Akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), penandatanganan ini sah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk fotocopy dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan QR Code pada dokumen tersebut.

berikut ini adalah data kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tabel IV.1

Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KK	BELUM MEMILIKI KK	JUMLAH KK	KEPEMILIKAN KK (%)
1	KAB. PASER	100.236	897	101.133	99,11
2	KAB. KUTAI KARTANEGARA	263.383	2.534	265.917	99,05
3	KAB. BERAU	103.252	636	103.888	99,39
4	KAB. KUTAI BARAT	61.431	1.903	63.334	97,00
5	KAB. KUTAI TIMUR	155.383	505	155.888	99,68
6	KAB. PENAJAM PASER UTARA	66.508	248	66.756	99,63
7	KAB. MAHKAM ULU	13.409	190	13.599	98,60
8	KOTA BALIKPAPAN	259.573	392	259.965	99,85
9	KOTA SAMARINDA	289.935	2.786	292.721	99,05
10	KOTA BONTANG	62.888	133	63.021	99,79
TOTAL		1.375.998	10.224	1.386.222	99,26

Sumber : Data PDAK Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2024

Pada tabel data di atas, jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1.386.22 atau 99,26% kepemilikan kartu keluarga, hal ini bisa dimungkinkan karena Penduduk yang sudah berkeluarga/menikah belum mengurus pisah KK sehingga datanya masih di KK yang lama atau masih ikut orang tua masing-masing.

2. Kepemilikan KTP Elektronik



Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah.

Tabel IV.2
Kepemilikan KTP-EL Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2024

WILAYAH	KEPEMILIKAN EKTP					
	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML
KALIMANTAN TIMUR	1.442.358	1.337.074	2.779.432	1.488.326	1.377.793	2.866.119
PASER	107.632	100.245	207.877	109.943	102.067	212.010
KUTAI KARTANEGARA	282.679	257.284	539.963	291.307	265.079	556.386
BERAU	104.419	89.813	194.232	109.774	94.149	203.923
KUTAI BARAT	67.066	60.267	127.333	69.504	62.220	131.724
KUTAI TIMUR	155.585	131.489	287.074	165.052	139.285	304.337
PENAJAM PASER UTARA	70.326	65.499	135.825	72.621	67.594	140.215
MAHKAM ULU	14.688	12.374	27.062	15.096	12.656	27.752
KOTA BALIKPAPAN	265.313	256.375	521.688	270.675	261.577	532.252
KOTA SAMARINDA	307.449	300.712	608.161	315.462	308.777	624.239
KOTA BONTANG	67.201	63.016	130.217	68.892	64.389	133.281

Sumber : Data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel diatas kepemilikan KTP-el di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berjumlah 2.721.538. Namun jumlah kepemilikan KTP-el di masing-masing kabupaten/kota belum merata dalam pelaksanaannya pada masing-masing kabupaten/kota, hal ini dikarenakan wilayah Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sangat besar dan kondisi geografis yang sebagian besar berupa hutan dan kawasan perkebunan. Hal tersebut, terus didekati melalui layanan jemput bola ke rumah-rumah Lansia, Lembaga Pemasyarakatan, sekolah, kelurahan, perusahaan perkebunan dan kegiatan gotong royong perekaman KTP-el bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

3. Kartu Identitas Anak (KIA)



Kartu Identitas Anak adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Sebelum bernama Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak merupakan kartu identitas bagi anak yang berdomisili di daerah untuk mendukung kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan

anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, dan memenuhi sebagian hak anak dalam terciptanya kesejahteraan anak. Di Provinsi Kalimantan Timur baru Kabupaten Berau yang telah memberikan insentif untuk pemegang KIA sedangkan Kabupaten/Kota yang lain akan segera berproses sehingga disampiang sebagai bukti identitas anak, KIA juga berfungsi sebagai kartu diskon diberbagai mitra usaha seperti:

1. Mitra Pendidikan
2. Mitra Kesehatan
3. Mitra Hiburan/Wisata
4. Mitra Busana
5. Mitra Olah Raga
6. Mitra Boga

Tabel IV.3
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Prov. Kaltim Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	USIA 0 - 17 (JUMLAH)	BELUM MEMILIKI (JUMLAH)	MEMILIKI (JUMLAH)	KEPEMILIKAN (%)
1	PASER	95,787	31,999	63,788	66.59
2	KUTAI KARTANEGARA	247,085	80,329	166,756	67.49
3	BERAU	93,900	28,328	65,572	69.83
4	KUTAI BARAT	54,198	19,134	35,064	64.70
5	KUTAI TIMUR	142,293	36,753	105,540	74.17
6	PENAJAM PASER UTARA	61,314	14,484	46,830	76.38
7	MAHKAM ULU	11,295	4,519	6,776	59.99
8	BALIKPAPAN	219,839	7,261	212,578	96.70
9	SAMARINDA	254,618	68,558	186,060	73.07
10	BONTANG	57,318	12,377	44,941	78.41
TOTAL		1,237,647	303,742	933,905	75.46

Sumber : Data PDAK Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2024

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah 75,99%. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak terbesar berada di Kota Balikpapan, yaitu sebesar 96,72% sedangkan terendah di Kabupaten Kutai Barat sebesar 66,18%.

4.1.2 Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada Pasal 68, kutipan Akta Pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran; (2) kematian; (3) perkawinan; (4) perceraian; (5) pengakuan anak (6) pengesahan anak.

1. Akta Kelahiran

Tabel IV.4
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Prov. Kaltim Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	WAJIB AKTA 2024	BELUM MEMILIKI (LK)	BELUM MEMILIKI (PR)	JUMLAH BELUM MEMILIKI	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	KEPEMILIKAN (%)
1	PASER	309.667	62.656	57.411	120.067	97.620	91.980	189.600	61,23
2	KUTAI KARTANEGARA	806.964	158.040	142.258	300.298	262.704	243.962	506.666	62,79
3	BERAU	299.005	62.067	52.524	114.591	96.860	87.554	184.414	61,68
4	KUTAI BARAT	186.581	45.895	40.705	86.600	52.174	47.807	99.981	53,59
5	KUTAI TIMUR	448.850	105.900	88.588	194.488	134.368	119.994	254.362	56,67
6	PENAJAM PASER UTARA	202.067	28.556	25.875	5IV.431	76.209	71.427	147.636	73,06
7	MAHKAMAH ULU	39.715	9.531	7.626	17.157	11.661	10.897	22.558	56,8
8	BALIKPAPAN	757.418	158.220	152.817	311.037	228.892	217.489	446.381	58,93
9	SAMARINDA	881.225	223.236	214.641	437.877	22IV.925	218.423	443.348	50,31
10	BONTANG	191.811	27.860	25.532	53.392	71.291	67.128	138.419	72,16
TOTAL		4.123.303	881.961	807.977	1.689.938	1.256.704	1.176.661	2.433.365	59,01

Sumber : Data PDAK Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2024



Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebanyak 2.433.365 jiwa atau mencapai 59,01%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Program Jemput Bola dan Layanan Terintegrasi kepemilikan akta kelahiran melalui Rumah Sakit/Puskesmas/klinik. Program tersebut mempermudah warga untuk membuat Akta Kelahiran, karena cukup di kelurahan/RS/Puskesmas/ Klinik sudah mendapatkan Akta Kelurahan, KK, KIA. Kepemilikan Akta Kelahiran tertinggi ada di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 73,06% dan Kota Bontang mencapai 72,16%. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran terendah ada di Kota Samarinda sebesar 50,31%. Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Prov. Kaltim Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	WAJIB AKTA 2024	BELUM MEMILIKI (LK)	BELUM MEMILIKI (PR)	JUMLAH BELUM MEMILIKI	MEMILIKI (LK)	MEMILIKI (PR)	MEMILIKI (JML)	KEPAMILIKAN (%)
1	PASER	100.526	1.082	944	2.026	50.723	47.777	98.500	97,98
2	KUTAI KARTANEGARA	257.650	1.328	1.250	2.578	131.637	123.435	255.072	99
3	BERAU	97.564	299	285	584	50.101	46.879	96.980	99,4
4	KUTAI BARAT	56.424	148	147	295	29.202	26.927	56.129	99,48
5	KUTAI TIMUR	148.027	289	259	548	76.727	70.752	147.479	99,63
6	PENAJAM PASER UTARA	64.290	132	110	242	33.262	30.786	64.048	99,62
7	MAHKAM ULU	11.917	77	89	166	5.978	5.773	11.751	98,61
8	BALIKPAPAN	230.506	355	303	658	118.773	111.075	229.848	99,71
9	SAMARINDA	265.753	5.291	4.845	10.136	131.740	123.877	255.617	96,19
10	BONTANG	60.629	260	206	466	31.066	29.097	60.163	99,23
TOTAL		1.293.286	9.261	8.438	17.699	659.209	616.378	1.275.587	98,63

Sumber : Data PDAK Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2024

Pada tabel diatas, cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Provinsi Kalimantan Timur adalah (98,63%), namun demikian tetap diperlukan kerja sama dan strategi di masing-masing kabupaten/kota agar cakupan kepemilikan Akta Kelahiran terus meningkat dan semua anak di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Akta Kelahiran yang mempunyai kekuatan hukum. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak tertinggi ada di Kota Balikpapan sebesar 99,71% diikuti oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 99,63% dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 99,62%. Sedangkan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak terendah ada di Kota Samarinda yaitu 96,19%.

2. Akta Kematian



Akta kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta Kematian sangat berguna untuk mengurus santunan kematian, hak waris, kepegawaian, asuransi dan peristiwa perdata lainnya. Pada tabel diatas, program Besuk Kiamat (Bela Sungkawa Kirim

Akta Kematian) lebih banyak dibanding yang mengurus Akta Kematian reguler melalui permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil. Program ini dilaunching tahun 2018 di seluruh kelurahan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan program tersebut, penerbitan Akta Kematian penduduk Provinsi Kalimantan Timur menjadi meningkat. Pemberian dokumen kependudukan "three in one" (Akta Kematian, KK, KTP-el suami/istri) merupakan pemberian dokumen kependudukan yang dilaksanakan ketika wakil pemerintah memberikan sambutan berduka cita kepada ahli waris jenayah. Sedangkan masih adanya warga yang mencari Akta Kematian reguler, karena diduga masyarakat cenderung mengurus akta kematian bila sudah terbentur pada kebutuhan yang memerlukan akta kematian dan karena effect pelaksanaan program Besuk Kiamat serta instansi-instansi publik sudah memberlakukan persyaratan Akta Kematian dalam kepengurusan di instansi publik tersebut.

Tabel IV.6
Jumlah Penerbitan Akta Kematian Prov. Kaltim Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TERBIT AKTA(LK)	TERBIT AKTA(PR)	TERBIT AKTA(JML)
1	PASER	9.937	6.615	16.552
2	KUTAI KARTANEGARA	24.033	17.233	41.266
3	BERAU	7.813	4.735	12.548
4	KUTAI BARAT	5.028	3.285	8.313
5	KUTAI TIMUR	6.664	3.664	10.328
6	PENAJAM PASER UTARA	6.923	4.498	11.421
7	MAHKAM ULU	1.103	854	1.957
8	BALIKPAPAN	30.578	20.568	51.146
9	SAMARINDA	34.139	22.437	56.576
10	BONTANG	5.649	3.953	9.602
TOTAL		131.867	87.842	219.709

Sumber : Data PDAK Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2024

Pada tabel diatas, jumlah penerbitan akta kematian di Provinsi Kalimantan Timur adalah 219.709 jiwa, namun demikian tetap diperlukan peningkatan di masing-masing kabupaten/kota agar jumlah penerbitan Akta Kematian terus meningkat karena banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya mengurus akta kematian tersebut. Jumlah penduduk Kaltim yang meninggal adalah Jumlah Terbit Akta. Jumlah penerbitan akta kematian tertinggi ada di Kota Samarinda sebesar 56.576 jiwa diikuti oleh Kota Balikpapan sebesar 51.146 jiwa. Sedangkan penerbitan akta kematian terendah ada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 1.957 jiwa.

3. Akta Perkawinan



Di dalam proses perkawinan, penduduk memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa perkawinan kepada negara. Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan

kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan yang muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinannya.

Tabel IV.7
Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Prov. Kaltim Tahun 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	STATUS KAWIN			AKTA KAWIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	(%)
1	PASER	71.952	70.750	142.702	102.389	40.176	71,75
2	KUTAI KARTANEGARA	185.639	182.419	368.058	263.375	104.437	71,56
3	BERAU	66.352	64.573	130.925	95.074	35.792	72,62
4	KUTAI BARAT	43.094	42.871	85.965	52.652	33.290	61,25
5	KUTAI TIMUR	101.275	98.487	199.762	129.038	70.601	64,60
6	PENAJAM PASER UTARA	45.748	45.692	91.440	70.630	20.767	77,24
7	MAHKAM ULU	8.691	8.406	17.097	7.884	9.198	46,11
8	BALIKPAPAN	163.221	164.981	328.202	186.344	141.778	56,78
9	SAMARINDA	196.916	196.517	393.433	275.818	117.506	70,11
10	BONTANG	41.455	41.068	82.523	60.066	22.431	72,79
TOTAL		924.343	915.764	1.840.107	1.243.270	595.976	67,57

Sumber : Data PDAK Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2024

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah kepemilikan akta perkawinan di Provinsi Kalimantan Timur. Dari 1.840.107 jiwa yang tercatat berstatus

kawin hanya 1.243.270 jiwa (67,57%) yang sudah memiliki akta perkawinan. Sedangkan sisanya 595.976 jiwa belum memiliki akta perkawinan. Hal ini dapat menghambat penduduk untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Capaian kepemilikan akta kawin di Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk tinggi. Penerbitan akta perkawinan terbesar di Kota Samarinda sebanyak 275.818 dokumen sedangkan terendah di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 7.884 dokumen.

4. Akta Perceraian



Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah Akta Perceraian. Bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Non-Muslim), maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraian melalui Pengadilan Agama.

Tabel IV.8
Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Prov. Kaltim Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	STATUS CERAI			AKTA CERAI		AKTA CERAI (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	
1	PASER	2,295	3,075	5,370	3,693	1,677	68.77
2	KUTAI KARTANEGARA	6,550	7,926	14,476	9,153	5,323	63.23
3	BERAU	2,390	2,787	5,177	3,902	1,275	75.37
4	KUTAI BARAT	1,460	1,977	3,437	1,512	1,925	43.99
5	KUTAI TIMUR	3,055	3,541	6,596	4,474	2,122	67.83
6	PENAJAM PASER UTARA	1,941	2,295	4,236	3,342	893	78.90
7	MAHKAM ULU	233	321	554	108	446	19.49
8	BALIKPAPAN	9,346	10,891	20,237	16,064	4,173	79.38
9	SAMARINDA	7,790	11,769	19,559	14,606	4,953	74.68
10	BONTANG	1,757	2,441	4,198	3,438	760	81.90
	TOTAL	36,817	47,023	83,840	60,292	23,547	71.91

Sumber : Data PDAK Kementerian Dalam Negeri - semester II tahun 2024

Penduduk di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yang berstatus cerai sebanyak 83.840 jiwa terdiri dari Laki-laki sebanyak 36,817 dan Perempuan sebanyak 47.023. Penerbitan akta perceraian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah 71,91%. Jumlah penerbitan akta perceraian terbesar terjadi di Kota Bontang, yaitu sebanyak 81,90% sedangkan terendah di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 19,49%.

BAB V

PENUTUP

Kependudukan menjadi fokus masalah setiap daerah dikarenakan perencanaan perkembangan pembangunan daerah tidak akan pernah terlepas dari masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek adanya pembangunan. Kekuatan daripada akurasi data yang disajikan dalam proses perkembangan kependudukan menjadi kunci mutlak mencapai tujuan pembangunan di masa mendatang. Penduduk sebagai subjek bertindak sebagai pemangku kebijakan dan menjadi objek dalam perencanaan pembangunan. Menjadi hal fatal apabila terdapat kesalahan dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan, yang itu akan berdampak kepada ketidakpastian dan kejelasan dalam perencanaan dan tercapainya tujuan pembangunan suatu daerah.

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk mengetahui gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Data utama yang digunakan berasal dari Data Kependudukan Bersih (DKB) dan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Berdasarkan paparan sebelumnya maka terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan, antara lain :

1. Dari sisi kuantitas penduduk, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk pada tahun 2024 sebesar 4.123.303 jiwa atau naik sejumlah 115.567 jiwa dari Tahun sebelumnya. Kenaikan penduduk ini juga diikuti oleh penduduk pindah dan kelahiran penduduk di sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari sebesar 31,56 jiwa per km² pada tahun 2023 menjadi 32,47 jiwa per km² pada tahun 2024. Selain itu distribusi penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tergolong tidak merata. Penduduk umumnya terdistribusi di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dari sisi kepemilikan dokumen kependudukan, kepemilikan dokumen kependudukan oleh penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dapat dikategorikan baik. Pada bagian kepemilikan KK ketercapaian kepemilikan 99.26% sudah tercapai. Sedangkan untuk kepemilikan dokumen pencatatan sipil, kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun 98.63%, hal tersebut bisa dilaksanakan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong program yang dapat mengakselerasi kepemilikan dokumen kependudukan untuk masyarakat.
4. Keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kepemilikan akta lahir anak dan dokumen penduduk lain perlu terus mendapat dukungan. Sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur harus terus digencarkan dan diinformasikan.
5. Inovasi program yang dihadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur secara dalam jaringan membantu pemerintah mewujudkan masyarakat tertib administrasi dokumen kependudukan dengan melakukan pengajuan sampai dengan penerbitan secara mandiri, aplikasi yang digunakan antara lain : Whatsapp, Instagram, Youtube, Website dan Aplikasi layanan daring.
6. Keakuratan data kependudukan selain bersumber dari pelaporan masyarakat yang tepat juga berasal dari kualitas SDM petugas registrasi (operator) yang baik. Untuk itu upaya meningkatkan kualitas SDM petugas registrasi bahkan sampai pada level bawah perlu terus diupayakan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis

menjemput bonus demografi di era 4.0, juga harus mempersiapkan upaya antisipatif menjawab tantangan tersebut dengan mempersiapkan lapangan pekerjaan dan mengakselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali.